

**SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN
KESENIAN DAERAH**

**(Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam
Melestarikan Topeng Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

DYAH YUSI MARSATANTI

0710310134



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2011**

MOTTO

Merenungkan tentang nikmat Allah sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama (Umar bin Abdul Azis)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2011
Jam : 12.00 WIB
Skripsi atas nama : Dyah Yusi Marsiatanti
Judul : **Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malang)**

dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



Drs. Rivanto, M.Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

Anggota



Drs. Muhammad Shoharuddin, MA
NIP. 19590219 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.22 Tahun 2003, Pasal 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juli 2011



Nama : Dyah Yusi Marsiatanti
Nim : 0710310134

RINGKASAN

Dyah Yusi Marsiatanti, 2011, **Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah** (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan), Dr. Hermawan, S.I.P, M.Si ; Drs. Riyanto, M.Hum, 151 Hal + xiv

Membangun suatu bangsa menuju perubahan yang lebih baik, tidaklah cukup hanya pembangunan fisik semata, tetapi juga aspek non-fisik sangat penting. Perlu adanya suatu orientasi yang sedemikian rupa sehingga esensi fisik berlanjut pada pembangunan tata nilai. Salah satu pendukung pembangunan yang sering terlupakan adalah bidang kebudayaan. Dalam menangani masalah kebudayaan, bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, namun peran dari swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Governance yakni kemitraan. Dengan demikian, penelitian berjudul Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan). Berkaitan dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan daerah. Dengan fokus yakni peran pemerintah, peran swasta, dan peran masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan. Dan faktor pendukung dan penghambat dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena melalui penelitian ini diharapkan akan dapat mengetahui pelaksanaan sinergi dari pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan daerah. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Malang. Sedangkan situs penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan sanggar seni Topeng Malangan.

Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian daerah, khususnya Topeng Malangan. Pemerintah hanya menjalankan tugas mereka secara administratif sesuai dengan bidang kebudayaan, swasta kurang begitu terlibat karena seperti yang diketahui bahwa kesenian kurang begitu komersil jika dijadikan bisnis, dan masyarakatnya lebih memilih menjalankan kebudayaan mereka dengan cara mereka sendiri pula. Sehingga tidak terjadi sinergi yang baik.

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain, terus mengadakan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, baik secara formal maupun non-formal, dari pemerintah lebih tanggung jawab dan responsif terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Mengadakan program yang berkaitan dengan pelestarian budaya, mengadakan pertunjukan Topeng Malangan secara kontinyu di suatu tempat, sehingga memudahkan wisatawan untuk mengenal lebih dekat kebudayaan Malang, memasukkan Topeng Malangan pada pihak swasta.

Kata kunci : *Good Governance, Kemitraan, Kesenian, Topeng Malangan*

SUMMARY

Dyah Yusi Marsiatanti 2011, **Synergy between Government and Communities in Preserving Local Art** (Studies in Culture and Tourism Office in Preserving Topeng Malangan), Dr. Hermawan, S.I.P, M. Si; Drs. Riyanto, M. Hum, 151 Hal + xiv

Building nation towards change for the better, it is not enough in just more physical essence, but also non-physical aspects. There needs to be an orientation such as that the physical essence continues on the development of values. One of the proponents of development that is often forgotten is the field of culture. In addressing issues of culture, not just that own government is responsible, but the role of the private and the public is needed. This is in accordance with the principles of *Good Governance* which is a partnership. Thus, the study entitled *The synergy between the Government and the Communities in Preserving Local Art*. The issue raised is how the synergy is exists between the government and the community in preserving local culture and what factors affect synergy. By highlighting the focus of the role of government, private sector role, and the community's role in preserving Topeng Malangan. And the second is enabling and inhibiting factors from the synergy between the government and the community in preserving Topeng Malangan.

The research method is used to descriptive research with a qualitative approach because it is through this research will hopefully be able to know the implementation of synergies from the government and the community in preserving the local art. In this study, the location of this research is Malang Regency.

The results of this study is the lack of synergy that exists between the government and the community in preserving local art, especially Topeng Malangan. It can be seen from each party run their own role. The government only their administrative duties in accordance with the field of culture, less involved because the private sector as it is known that the arts are less commercial if used as a business, and people prefer to run their culture in their own way anyway. So there is no good synergy.

From the research, there are a few suggestions that can be given by the researchers, among others, kept up communication between the government and society, both formal and non-formal education, from government more responsible and responsive to issues related to art preservation. Conducting a program related to cultural preservation, performing continuously Topeng Malangan somewhere, making it easier for tourists to know better the culture of Malang, enter Topeng Malangan on private parties.

Keywords: Good Governance, Partnership, Art, Topeng Malangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Khairil Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Dr. Hermawan, S.I.P, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing.
4. Drs. Riyanto, M.Hum, selaku Anggota Komisi Pembimbing.
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang beserta staf.
6. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat untuk menulis.
7. Teman-teman publik 2007 yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik serta masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Administrasi Pembangunan	19
B. Teori Governance	22
1. Definisi Governance	24
2. Prinsip-prinsip Good Governance	37
3. Pilar-pilar Good Governance	41
C. Kebudayaan	43
1. Definisi Kebudayaan	45
2. Wujud Kebudayaan	47
3. Unsur-unsur Kebudayaan	49
4. Kebudayaan Daerah	52
5. Kesenian	52
D. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat	55
1. Kemitraan	57
2. Prinsip Kemitraan	57
3. Model-model Kemitraan	55
4. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat	57
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Fokus Penelitian	62
C. Lokasi dan Situs penelitian	63
D. Sumber dan Jenis data	64

E. Metode pengumpulan data	65
F. Instrumen Penelitian	67
G. Analisis Data	68

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **71**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kondisi Kabupaten Malang	71
2. Kondisi Seni Budaya	74
B. Gambaran Umum Situs Penelitian	79
C. Penyajian Data	
1. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat	100
a. Peran Pemerintah	100
b. Peran Masyarakat	107
c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan	124
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	127
D. Analisis	
1. Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat	130
a. Peran Pemerintah	130
b. Peran Masyarakat	135
c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan	137
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	142

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

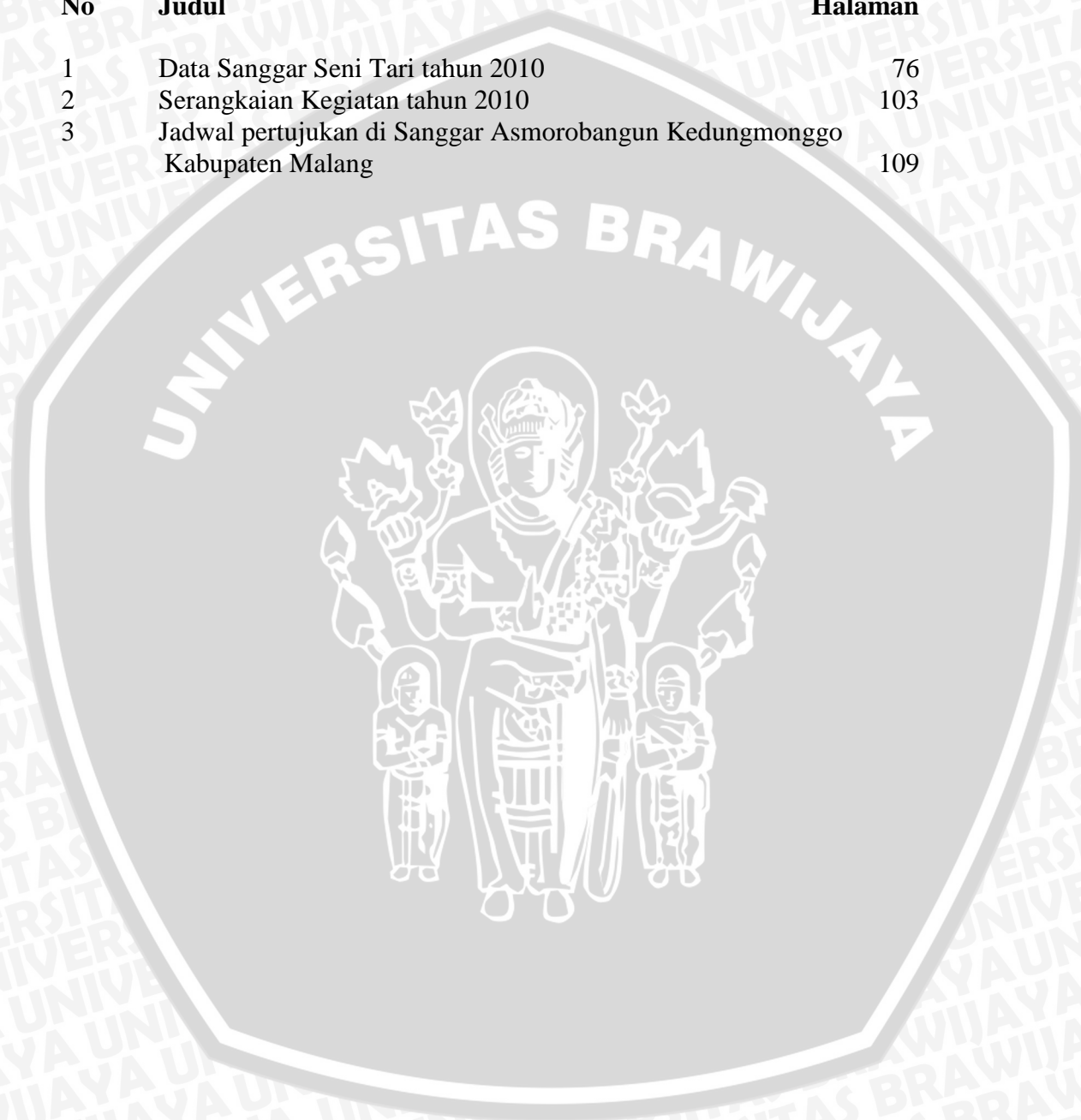
A. Kesimpulan	146
B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Data Sanggar Seni Tari tahun 2010	76
2	Serangkaian Kegiatan tahun 2010	103
3	Jadwal pertunjukan di Sanggar Asmorobangun Kedungmonggo Kabupaten Malang	109



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Kebudayaan	47
2	Peta Kabupaten Malang	73
3	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83
4	Suasana Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)	101
5	Suasana pembinaan di Kepanjen	102
6	Halaman samping stadion Kanjuruhan	116
7	Pendopo (tampak depan)	116
8	Bagian dalam pendopo	117
9	Pementasan Topeng Malangan di acara Malang Tempo Dulu (MTD)	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sekian bidang pembangunan yang ditangani oleh pemerintah, bidang kebudayaan merupakan salah satu bagian penting dari urusan pemerintah. Dimana urusan tersebut memerlukan upaya koordinatif yang berhubungan dengan Administrasi Publik. Dan Administrasi Publik itu sendiri menurut John M. Pfiffer dan Robert V. Presthus (dalam Syafie, 2006:23), "*Public Administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly occupied with the daily work of governments*". Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan publik. Hal ini terutama mendalami pekerjaan sehari-hari dari pemerintah". Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa Administrasi Publik adalah koordinator dalam segala urusan pemerintah. Dalam menyelesaikan urusan pemerintah tentunya dilakukan melalui perbaikan-perbaikan di berbagai bidang. Dan itulah yang dapat dikaitkan dengan pembangunan karena pembangunan dalam konteks administrasi publik merupakan suatu upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kearah yang lebih baik. Sebagaimana Siagian (2001:4) yang mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Salah satu cabang dari Administrasi Publik adalah Administrasi Pembangunan. Administrasi pembangunan, menurut Tjokroamidjojo (1995:222) didefinisikan tidak hanya kemampuan untuk menetapkan strategi pembangunan yang baik, kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga dapat menimbulkan respon dan kerjasama seluruh rakyat dalam proses pembangunan. Lebih lanjut administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat luas, sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan.

Menuju arah pembangunan yang diinginkan tentunya tak lepas dari faktor pemerintah yang baik (*Good Governance*). *United Nation Development Program* menguraikan definisi *Good Governance* yang lebih spesifik dari pada pengertian *Governance*.

Good Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan negara, yang memiliki mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks di mana warga negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada di antara mereka (UNDP dalam Setiyadi, 2003:78).

Ada tiga komponen domain yang terlibat dalam *Good Governance*, yaitu pemerintah (*state*), dunia usaha (*State*), dan masyarakat (*society*) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (Kushandajani, 2001: 67). Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif karena pemerintah selain berperan sebagai regulator juga diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat berperan serta

aktif secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial. Sektor swasta berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Paradigma *Good Governance* menekankan arti pentingnya kesejajaran hubungan antara institusi pemerintah, negara, dan masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi sederajat dan saling kontrol (*check and balance*) untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu komponen, terhadap komponen lainnya.

Dewasa ini, untuk membangun suatu bangsa menuju perubahan yang lebih baik, tidaklah cukup hanya dalam esensi fisik semata, tetapi juga aspek non-fisik antara lain bidang budaya. Perlu adanya berbagai orientasi yang sedemikian rupa sehingga esensi fisik berlanjut pada pembangunan tata nilai. Pembangunan secara non-fisik tersebut dijiwai semangat peningkatan tata nilai sosio-kemasyarakatan dan budaya. Salah satu pendukung pembangunan yang sering terlupakan adalah bidang kebudayaan. Dalam kehidupan bernegara, kebudayaan juga dapat mempengaruhi individu-individu, baik hubungan individu terhadap kelompok besar (organisasi) maupun kelompok kecil (keluarga). Seperti pernyataan dibawah ini :

“The first cultural dimension is Collectivism–Individualism, it reflects whether people belong to in-groups them members of which take care of each other in exchange for loyalty, or whether they tend to look only after themselves (and possibly their immediate family)”, (Eelke De Jong, Roger Smeets And Jeroen Smits, 2005:118). "Dimensi budaya pertama adalah kolektivisme-individualisme, itu mencerminkan apakah orang-orang saling memiliki diantara di kelompok-kelompok mereka untuk peduli satu sama lain dalam hal loyalitas,

atau apakah mereka cenderung hanya melihat diri mereka sendiri (mungkin keluarga dekat mereka)"

Bahwa sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh manusia merupakan hasil dari kebudayaan darimana orang tersebut berasal. Sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan yang akan diambil dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Pudarnya kecintaan kepada tanah air harus segera digelorakan dalam segala cara. Pengetahuan akan kebudayaan klasik diharapkan mampu mengembalikan rasa percaya diri dalam mengatasi krisis nasional kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cara membangkitkan kembali rasa cinta dan bangga kepada Negara adalah melalui pemanfaatan budaya sebagai bentuk identitas suatu bangsa (Brahmana, 2009). Dalam hal ini, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memberikan kebijakan, terkait masalah kebudayaan, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Fungsi kebudayaan (kesenian) yang dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya (pelaku seni) itu merupakan alat penyambung non-jasmaniah yang mempermudah upaya manusia memenuhi kebutuhan pokok maupun dalam usaha memahami lingkungan dimana mereka merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Dan kebudayaan (kesenian) daerah mencerminkan nilai luhur bangsa sehingga perlu dipelihara, dibina, dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkukuh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, hasrat masyarakat

untuk berperan aktif dalam proses pengembangan kebudayaan nasional/ daerah terus digairahkan (Maryaeni, 2005:91).

Setiap Negara di dunia tentunya menganggap kebudayaan sebagai salah satu warisan leluhur yang harus dijaga. Kebudayaan tersebut harus dilestarikan. Seperti yang dikatakan oleh Daniels, *“the right to culture has been the focus of anthropological discussions, less attention has been paid to other mechanisms that may encourage cultural preservation”* (Daniels, 2010:884), artinya hukum budaya telah menjadi fokus dari diskusi antropologis, kurangnya perhatian telah mekanisme lain yang dapat mendorong pelestarian budaya”. Maksudnya kebudayaan merupakan fokus dari antropologi, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus untuk melestarikan kebudayaan. Perhatian disini tentunya bukan datang dari masyarakat saja, namun pemerintah juga harus lebih berperan aktif dalam pelestarian budaya.

Berbagai negara didunia juga memiliki kebudayaan yang khas, salah satunya di Jepang. Kebudayaan Jepang yang sampai saat ini masih dilakukan adalah perayaan *hanami*, tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi. Biasanya mereka piknik dengan menggelar tikar untuk pesta makan-makan di bawah pohon sakura. Di India, terdapat Taj Mahal di kota Agra yang dibangun oleh Shah Jahan sebagai makam untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. UNESCO telah memasukkannya ke dalam daftar Situs Warisan Dunia. Tentunya masih banyak kebudayaan dunia yang indah lainnya (Brahmana, 2009).

Di Indonesia, kebudayaan begitu beragam. Secara geografis hal itu memang masuk akal karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia terdiri dari 17.480 pulau, dengan suku bangsa sebanyak 1.128 suku. Sehingga keragaman itu akan sangat terlihat. Banyak sekali budaya Indonesia yang terkenal, antara lain tarian Saman dari Aceh, tari Pendet dari Bali, dan masih banyak yang lainnya.

Seiring berjalannya waktu, terjadi krisis multi-dimensi yang meruntuhkan seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, korupsi sudah memasuki jiwa seluruh lapisan birokrasi dari kota sampai desa. Dalam kebangkrutan ekonomi, masyarakat dihadapkan dalam pupusnya semangat kebangsaan. Solidaritas sesama anak negeri kian redup, akibat kesenjangan sosial-budaya dan ekonomi yang teramat parah. Ketegangan antar suku, agama, dan golongan nyaris tak terkendali. Dekandensi moral semakin memperburuk keadaan, karena sudah meracuni jiwa kaum muda yang kelak akan memimpin negeri dan bangsa ini. Hal itu terus diawali dengan perubahan paradigma pendidikan agar lebih mencermati aspek kebudayaan bangsa (Soeroto, 2007 : 1).

Pada saat Orde Lama, kebudayaan nasional digambarkan sebagai “puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia”. Yang dimaksud puncak-puncak kebudayaan daerah adalah unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal dan dapat diterima oleh suku bangsa lainnya, tanpa menimbulkan gangguan terhadap latar belakang budaya kelompok yang menerima sekaligus mewujudkan kesatuan budaya nasional. Selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia perlu diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai pedoman

bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di antara seluruh rakyat Indonesia (Solaeman 2007:63). Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial yang menyiratkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air, serta kelestariannya, nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai dan saling menolong antar sesama warga negara, untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Jangan sampai terjadi kejadian pada tahun 2009, dimana maraknya pencurian kebudayaan oleh Malaysia terjadi lagi. Seperti yang dikatakan Teguh Prasetyo dalam artikel *Budaya Lokal Kita Sering Dicuri Malaysia*, bahwa kebudayaan Indonesia dicuri dengan meletakkan tari Pendet Bali pada iklan Visit to Malaysia. Fenomena pencurian kesenian dan kebudayaan oleh Malaysia, tentu bukanlah yang pertama atau yang terakhir. Sebelumnya, Malaysia telah mengklaim tari Reog Ponorogo dengan sebutan tari Barongan, lagu Rasa Sayange dari Ambon dijadikan jingle pariwisata Malaysia, angklung, keris, batik, dan lagu Es Lilin asli Sunda. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kejadian memalukan seperti itu jangan sampai terjadi kembali.

Lunturnya nilai kebudayaan juga ditunjukkan dengan adanya warisan 3000 budaya material, sebagian merupakan *dead monument*, bangunan yang tidak difungsikan lagi seperti candi, punden, situs megalit, benteng, dan lainnya (Soeroto, 2007:9). Dulunya bangunan-bangunan ini ada untuk melambangkan kesejahteraan warganya. Sekarang hanya tinggal objek bangunan.

Bertahun-tahun Indonesia telah merdeka dan bertahun-tahun juga modernisasi masuk ke Indonesia. Masuknya budaya Westernisasi ke Indonesia

membuat budaya lokal yang telah singgah terlebih dahulu di Indonesia mengharuskannya memiliki nilai tawar yang lebih kepada masyarakat terutama kepada generasi muda, supaya mereka dapat bertahan dan tetap hidup ditengah dunia yang semakin modern. Masyarakat dan kebudayaan dimanapun memang selalu berubah, sekalipun masyarakat dan kebudayaan primitif yang terisolasi jauh dari berbagai perhubungan dengan masyarakat lainnya. Terjadinya perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal (Solaeman, 2007:45) :

1. Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jumlah penduduk dan komposisi penduduk.
2. Sebab-sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dengan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah secara lebih cepat.

Seperti yang tengah terjadi di Malang, kebudayaan yang dimiliki kian hari seperti kian luntur termakan modernisasi. Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi disertai panorama yang indah, memiliki kekayaan etnik dan budaya yang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Dan yang sampai saat ini tetap menjadi kebanggaan adalah Topeng Malangan. Topeng Malangan adalah sebuah pertunjukan tari dengan penampilan tokoh-tokoh pewayangan seperti Panji, Klana, Gunungsari, Panji Asmorobangun, dan Patrajaya. Tari Topeng sendiri diperkirakan muncul pada masa awal abad 20 dan berkembang luas semasa perang kemerdekaan. Tari Topeng adalah perlambang bagi sifat manusia, karenanya banyak model topeng yang menggambarkan situasi yang berbeda, menangis, tertawa, sedih, malu dan sebagainya (Hidayat, 2008 : 9).

Menurut survey awal yang dilakukan oleh peneliti, keberadaan Topeng Malangan belum terjamah pemerintah secara serius. Pemerintah mengakui adanya

Topeng Malangan, tetapi tidak ada praktek yang serius dalam upaya pelestariannya. Terbukti dengan pertunjukkan Topeng Malangan yang telah jarang diadakan di Malang. Dan para seniman menyayangkan adanya bantuan dana dari pemerintah yang kurang memadai. Belum ada anggaran khusus bagi kesenian Malang yang harusnya menjadi tugas dari pemerintah.

Sebenarnya dalam peraturan perundangan Indonesia telah di atur mengenai pelestarian budaya. Seperti yang tercantum dalam pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*. Maksudnya, pemerintah sendiri telah mengatur bahwa kebudayaan itu harus dilestarikan walaupun tengah berada dalam peradaban jaman yang dapat pelan-pelan mengikis kebudayaan tersebut. Bukan hanya di Indonesia, di dunia juga telah ada peraturan yang mengatur pelestarian budaya. Seperti dalam the United Nations Universal Declaration of Human Rights (1948), dalam pasal 22 dan 27 menyimpulkan bahwa :

“everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits and that everyone, as a member of society, has the right to the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality” (Daniels, 2010:884). "Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi semua orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak untuk menikmati ekonomi, sosial dan budaya sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuha kepribadiannya”.

Bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan, seperti menikmati seni yang ada, pertunjukan, berbagai ilmu baik ilmu pengetahuan maupun kemasyarakatan dan juga setiap orang berhak menikmati keadaan sosial, ekonomi maupun budaya yang ada dalam mengembangkan pribadi mereka. Jelas sekali bahwa dunia juga mengakui bahwa kebudayaan juga merupakan komponen yang perlu diperhatikan karena budaya merupakan milik sah masyarakat. Sehingga dari sinilah perlu diadakannya suatu perhatian yang khusus terhadap kebudayaan.

Masalah bukan hanya datang dari pemerintah saja, masyarakatpun saat ini mulai meninggalkan kesenian yang telah menjadi kebanggaan Malang. Hanya ada segelintir orang maupun kelompok seni yang bertahan dengan segala keterbatasan. Seperti yang terjadi pada padepokan seni Asmorobangun, setiap bulan mereka berusaha menampilkan pementasan Topeng Malangan, yang biasa disebut pertunjukkan *senin legian* (legi merupakan salah satu hari di penanggalan Jawa, penulis). Pertunjukan *senin legian* bukan merupakan pertunjukkan yang besar, pertunjukkan itu hanya dilakukan di pendopo utama padepokan seni Asmorobangun dan kebanyakan yang melihat adalah penduduk sekitar. Pertunjukan seperti ini sebenarnya sangat potensial, namun dari pihak penyelenggara tidak memiliki harapan yang muluk, mereka hanya berusaha agar kesenian ini tetap terjaga walaupun dengan keadaan apapun. Kegigihan dari para seniman ini harusnya mendapat dukungan yang besar dari pemerintah maupun masyarakat sekitar.

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, telah memiliki Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2008 sebagai pedoman dalam mengurus masalah kebudayaan. Sedangkan peraturan daerah yang terkait masih dalam proses perencanaan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Sehingga hanya ada Peraturan Bupati saja. Beberapa dari peraturan tersebut telah dilaksanakan dan beberapa belum. Yang telah dilaksanakan antara lain, pembinaan kesenian, pengawasan dan pengendalian dengan diberlakukannya KNIK (Kartu Nomor Induk Kesenian) yang berfungsi untuk merapikan kesenian yang ada.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggung jawab pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Namun sampai dengan saat ini, kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam pelaksanaannya masih sangat beragam. Beragamnya kualitas pengelolaan budaya tidak hanya disebabkan oleh kecilnya pendanaan, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam dunia Internasional, seperti yang digagas oleh UNESCO pada tahun 1970 bahwa :

“UNESCO created a state-based framework governing the disposition of stolen artwork, antiquities, and other objects of archaeological, ethnological, and historical interest; and the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (UNESCO 1972) provided a mechanism for acknowledging the cultural and natural sites deemed to be especially noteworthy by international experts” (Daniels, 2010:885). "UNESCO menciptakan sebuah kerangka kerja berbasis negara yang mengatur disposisi karya seni curian, barang-barang antik, dan benda-benda lain yang menarik arkeologi, etnologis, dan sejarah, dan Konvensi Mengenai Perlindungan Budaya Dunia dan Warisan Alam (UNESCO 1972)

memberikan mekanisme untuk mengakui situs-situs budaya dan alam dianggap sangat penting oleh pakar internasional".

Pada tahun 1970 dan 1972 UNESCO telah menciptakan sebuah kerangka kerja berbasis negara yang mengatur perlindungan terhadap karya seni, barang antik, dan benda-benda arkeologi, etnologis, dan sejarah lainnya yang menyediakan mekanisme untuk mengakui bahwa situs budaya dan alam dianggap terutama patut diperhatikan oleh para pakar internasional. Dan program-program seperti inilah yang diharapkan mampu melindungi kebudayaan bangsa, sehingga jelaslah peran pemerintah disini dalam upaya pelestarian tersebut.

Masyarakat sebagai pemilik sah dari sebuah kebudayaan juga memiliki peran penting dalam pelestarian sebuah kebudayaan. Masyarakat dipandang sebagai *voluntaristik associationalism*, di mana hubungan masyarakat didorong oleh wacana demokrasi, solidaritas, kesopanan, kejujuran, dan saling menghormati (Roginsky, 2009:475). Seperti juga dalam melestarikan Topeng Malangan, secara kasar, masyarakatlah yang memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam Topeng Malangan, sehingga masyarakatlah yang dirasa lebih dekat dengan sebuah kebudayaan, sehingga sebuah solidaritas dan saling menghargai antar sesama dalam menjaga kebudayaan perlu dilakukan secara terus-menerus. Perjalanan dari sebuah kebudayaan juga tergantung dari bagaimana suatu masyarakat tertentu menurunkan kebudayaan pada generasi berikutnya. Masyarakat memiliki sebuah tanggung jawab sosial terhadap pelestarian kebudayaan (kesenian).

Urusan pemerintahan tidak hanya ditangani oleh pemerintah semata, dibutuhkan sebuah kemitraan. Kebutuhan kemitraan dengan melibatkan negara,

swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan baik di tingkat lokal dan internasional menjadi kebutuhan yang urgen bagi pemerintah. Dalam posisi seperti ini, kebijakan negara sangat bermakna, tidak saja sebagai fungsi regulatif dalam negeri tetapi juga fungsi strategis dalam hubungan internasional. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan pelestarian budaya di satu negara tidak dapat dianalisis tanpa mengkaitkan dengan kepentingan kemitraan antar pemerintah, bisnis dan masyarakat agar tidak terjadi kejadian pencurian kebudayaan yang terjadi sebelumnya. (Zaini Rohmad dan Sudarmo, 2009 : 3)

Dalam perkembangannya, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, haruslah masyarakat Malang itu sendiri memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan kesenian Topeng Malangan tersebut. Pihak swasta yang selama ini memiliki peran bisnis, memiliki tanggung jawab yang besar pula dalam melestarikan kesenian terkait dengan pariwisatanya. Penelitian ini menyoroti tentang kemitraan terkait dengan *Good Governance*, namun peneliti hanya fokus pada peran pemerintah dan masyarakat dengan tidak mengabaikan peran dari swasta. Guna mencari pola kemitraan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan, maka judul dari penelitian ini Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, nasib Topeng Malangan nyatanya masih belum tersentuh tangan pemerintah secara serius, oleh karena itu sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian Topeng Malangan sangat dibutuhkan.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah sinergi yang terjalin antara pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan, yaitu :

1. Mendeskripsikan tentang sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
2. Mendeskripsikan tentang faktor yang menghambat dan mendukung dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

D. Kontribusi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) terhadap semua pihak yang terkait dengan penerapan konsep sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan budaya baik secara akademis maupun praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain:

1. Kontribusi Akademis

- a. Menjadi bahan referensi tambahan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkenaan dengan sinergi yang dijalankan sebagai perwujudan *Good Governance* dalam rangka pelestarian kesenian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan info pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan referensi serta bahan masukan bagi penelitian yang akan datang dalam judul dan topik yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Masukan kepada pemerintah agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai pelestarian kesenian Topeng Malangan.
- b. Sebagai usaha promosi, khususnya dalam rangka pengenalan kesenian Topeng Malangan kepada masyarakat secara lebih luas.
- c. Mengajak masyarakat luas untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap kesenian Topeng Malangan.

3. Kontribusi bagi peneliti

- a. Sebagai pengembangan dari ilmu yang telah diterima di bangku kuliah
- b. Sebagai syarat menerima gelar sarjana atau S1
- c. Salah satu wahana bagi peneliti dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuannya, khususnya bidang kebudayaan serta sebagai sumbangan informasi bagi penelitilainnya sepanjang menyangkut objek yang sama, sekalipun dalam ruang lingkup yang berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan mempermudah pemahaman untuk mendapatkan suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahsan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari lima subbab. Pertama akan menjelaskan tentang latar belakang yang mengemukakan tentang permasalahan yang diangkat sehingga dapat dijadikan alasan pemilihan judul penelitian. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan tentang hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan dalam penelitian. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian yang akan

dilakukan secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep dalam teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diketengahkan sebagai acuan dalam membahas permasalahan yaitu tentang Administrasi Pembangunan, *Good Governance*, terdiri dari prinsip dan pilar *Good Governance*. Kemudian tentang kebudayaan, terdiri dari definisi kebudayaan, wujud kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, kebudayaan tradisional (kebudayaan daerah), kesenian. Yang terakhir adalah tentang sinergi, meliputi kemitraan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh. Pertama, mengenai jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kedua, fokus penelitian yang meliputi bentuk peran pemerintah, peran masyarakat, kemudian sinergi yang terjalin diantara keduanya. Fokus berikutnya adalah mengenai faktor penghambat dan pendukung dari sinergi tersebut.

Ketiga, lokasi dan situs penelitian dilaksanakan yaitu Kabupaten Malang tepatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan sanggar seni Topeng Malangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder.

Kelima, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang meliputi teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Keenam, instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya yang meliputi buku catatan, alat tulis dan alat bantu. Ketujuh, analisis data yang menggunakan metode interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab, dimana subbab pertama akan menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Malang dan kondisi kesenian di Kabupaten Malang. Subbab kedua akan menguraikan penyajian data yang meliputi bentuk peran pemerintah dalam melestarikan kebudayaan, peran masyarakat dalam melestarikan kebudayaan, kemudian sinergi yang terjalin diantara keduanya. Berikutnya mengenai faktor penghambat dan pendukung dari sinergi tersebut.

Sementara subbab yang ketiga akan menguraikan pembahasan tentang bentuk sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan daerah. Dalam subbab ini, akan menguraikan mengenai penyajian data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipih sesuai tema penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua subbab pokok yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ditarik dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan

rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melestarikan kebudayaan daerah, dalam hal ini adalah Topeng Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Pembangunan bukan hanya dapat dilihat dari banyaknya gedung bertingkat yang berdiri di setiap sudut kota. Pelestarian kebudayaan juga merupakan bentuk pembangunan dari segi sosial yang juga menunjang kehidupan berbangsa, terlebih bangsa Indonesia. Pelestarian budaya ini diharapkan mampu menunjang pembangunan karena berkaitan dengan tetap terjaganya identitas bangsa ditengah modernisasi saat ini.

Definisi kerja dari administrasi pembangunan, memisahkan pokok pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan (Siagian, 1973:13) dikemukakan bahwa :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dari definisi menurut Siagian tersebut, maka jelas dapat dilihat pokok-pokok ide yang tersurat, yaitu adanya suatu proses yang terus-menerus, usaha yang dilakukan dengan melestarikan kebudayaan daerah. Hal ini dirasa penting karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Sedangkan definisi kerja dari administrasi pembangunan menurut Siagian adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai

suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi pembangunan juga diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang diarahkan pada suatu keadaan yang dianggap baik dan juga kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa untuk mendorong atau mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa (*nation building*) dan atau perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan ke arah kemajuan seringkali disebut pula oleh pada cendekiawan sebagai modernisasi (Tjokroamidjojo, 1985:13).

Tjokroamidjojo (1985:9) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Administrasi Pembangunan, menjelaskan bahwa administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda.
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*committed*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif.
3. Administrasi pembangunan justru berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovation*) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan.
4. Administrasi pembangunan lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development fuction*) dari pemerintah.
5. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
6. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*).
7. Administrasi pembangunan lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Administrasi pembangunan tentunya mengarahkan suatu bangsa dalam pelaksanaan pembangunan agar kedepan pembangunan bisa menjadi sebuah nilai keberhasilan suatu bangsa. Dari uraian ciri-ciri Administrasi Pembangunan di atas, beberapa telah mengidentifikasi ciri-ciri yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, dan kebudayaan daerah di Indonesia juga sangat banyak dan beragam, sedangkan kebudayaan itu diisi oleh masyarakat-masyarakat, sehingga Administrasi Pembangunan tentunya mampu memberikan *service* kepada masyarakat dengan segala kewenangan yang ada agar kebudayaan bangsa tetap terjaga. Dan segala kebijakan yang di ambil oleh pemerintah harus berorientasi bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga bidang kebudayaan yang tentunya memiliki peran yang tak kalah penting.

Dalam Administrasi Pembangunan, pemerintah sebagai administrator penggerak perubahan perlu mengadakan reformasi-reformasi kebudayaan agar bidang ini tak lepas dari pembangunan. Perlu adanya pembaruan sudut pandang dan implementasi konsep pendidikan sehingga menjadi sarana utama pendidikan kultural, agar wawasan kebudayaan masuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia (Soeroto, 2007:5).

Kebudayaan bukan sekedar pengetahuan yang perlu diajarkan sejak dini, namun kebudayaan adalah milik utama suatu bangsa yang berfungsi sebagai pemersatu dan pengikat emosional-spiritual seluruh rakyat.

B. Teori Governance

1. Definisi Governance

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan – urusan Negara pada semua tingkat (UNDP dalam Krina, 2003:5). Melestarikan kebudayaan juga merupakan urusan pemerintah karena yang pemerintah mempunyai kekuatan yang penuh dalam memfasilitasi segala kebutuhan tentang kebudayaan.

Ada banyak pengertian mengenai pemerintahan, Lipehak (2002:2) mendefinisikan *governance*. “*how governance function and works together with other to make decisions and take action to deal with the needs of its citizens*” (bagaimana pemerintah berfungsi dan bekerja sama untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat). Pemenuhan kebutuhan disini adalah kaitannya dengan pelestarian Topeng Malangan yang saat ini membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Sementara itu, *World Bank* (Bank Dunia) mendefinisikan *governance*, “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” (cara menggunakan kekuasaan Negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan) (World Bank dalam LAN, 2000:5). Berkaitan dengan sosial untuk pembangunan adalah pelestarian kebudayaan tersebut guna tetap terjaganya identitas bangsa.

Perubahan paradigma dari *Government* ke *Governance* yang lebih menekankan bahwa orientasi administrasi publik saat ini sedang diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan rakyat, selanjutnya membawa pengaruh besar dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya antara lain ditematkannya rakyat pada posisi yang utama dalam keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintah (*Government*) akan tetapi beralih kepada aspek tata pemerintahan (*Governance*) dalam melestarikan kebudayaan.

Berkaitan dengan penelitian ini, institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu *state* (Negara), *Privat Sector* (sektor swasta atau dunia usaha), *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing – masing (LAN dan BPKP, 2005:5). Institusi pemerintahan fungsinya membuat kebijakan terkait pelestarian kebudayaan, sektor swasta terkait dengan promosi pariwisata agar lebih dikenal, sedangkan *society* berperan aktif sebagai pelaku seni (seniman) dan pemilik sah dari sebuah kebudayaan. Namun dalam penelitian ini yang dibutuhkan hanyalah interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat saja.

Negara sebagai suatu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga - lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi kegiatan terkait dengan bisnis, dalam pelestarian budaya, promosi juga memiliki peran yang penting. Sedangkan masyarakat (*society*) sebagai penggerak daro kebudayaan yang ada. Dan pemerintah, memfasilitasi segala kebutuhan yang terkait dengan pelestarian budaya. Dalam penelitian ini, pihak swasta kurang begitu disoroti

dikarenakan di Malang sendiri perannya kurang begitu menonjol dalam pelestarian Topeng Malangan, sehingga hanya mendeskripsikan tentang sinergi antara pemerintah dan masyarakat saja dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

2. Prinsip *Good Governance*

Kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Prinsip-prinsip *Good Governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah, pemerintah juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam pemerintahan yang baik, dengan demikian akan berdampak pada masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah. Pelayanan tersebut berupa kewenangan yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan daerah, khususnya Topeng Malangan. Berikut akan dipaparkan terlebih dahulu seluruh prinsip dari *Good Governance* menurut G. Stoker (dalam Islamy, 2003: 72-74) yang mengemukakan adanya 5 proposisi yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji konsep *Good Governance*, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu memanfaatkan seperangkat institusi dan aktor baik dari dalam maupun luar birokrasi pemerintah. Pemerintah perlu membuka pintu dan tidak curiga terhadap

eksistensi berbagai institusi pemerintahan, bahkan sebaliknya hal itu bisa dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam kegiatan pemerintahan berkaitan dengan kebudayaan, pemerintah telah memiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penggerak utama yang seharusnya berperan langsung terhadap pelestarian kebudayaan. Adapula Dewan Kesenian Kabupaten Malang sebagai organisasi non-pemerintah yang juga berfungsi menangani hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan. Dengan adanya beberapa organisasi ini bisa dimanfaatkan sebagai komponen penguat dalam mencapai tujuan bersama melestarikan kesenian Topeng Malangan.

- b. Penyelenggaraan pemerintah yang baik tidak memungkinkan lagi terjadi trikotomi peran serta sektor pertama (eksekutif dan legislatif), sektor kedua (swasta), dan sektor ketiga (masyarakat) dalam menangani masalah kebudayaan, karena peran tersebut seyogyanya harus menyatu dan terpadu karena mereka mempunyai kepentingan dan komitmen yang sama tingginya untuk mengatasi masalah kebudayaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendeskripsikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat saja yang diharapkan mampu bekerja sama dalam melestarikan kebudayaan. Pihak swasta tidak dicantumkan karena kesulitan data yang diperoleh karena perannya yang kurang dalam melestarikan Topeng Malangan.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mengakui adanya saling ketergantungan diantara ketiga faktor diatas dalam peran bersama untuk

mengatasi masalah kebudayaan. Namun dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak membutuhkan lagi satu kekuatan atau sektor maupun yang dominan melebihi perannya atas yang lain, melainkan semuanya berinteraksi dan beriterelasi serta punya akses yang sama dalam berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan daerah. Dengan tetap terjaganya suatu kebudayaan akan memberikan kesejahteraan tersendiri bagi masyarakat.

d. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan jaringan kerja antar aktor dari ketiga kekuatan (sektor) yang menyatu dalam suatu ikatan yang otonom dan kuat. Institusi – institusi yakni dari pihak Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan para seniman, khususnya seniman Topeng Malangan. Dari ketiga sektor tadi akan menjadi kekuatan yang solid dan dasyat bila mereka bersedia memberikan dan menerima kontribusi baik sumber-sumber, keahlian, kepentingan, maupun tujuan - tujuan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menghadirkan dua aktor ini, tujuan untuk tetap melestarikan kebudayaan diharapkan mampu berjalan maksimal.

e. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak perlu semata-mata menggantungkan diri pada arahan, petunjuk dan otoritas pemerintah tetapi juga kemampuan

untuk memanfaatkan sarana teknik pemerintahan dari sektor non-pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang baik dan benar. Pemerintah perlu mengajak sektor yang lain untuk ikut berperan serta dalam proses kebijakan tersebut. Dan peran pemerintah cukup sebahai *catalysator dan enabler*. Seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya, pemerintah memiliki Dewan Kesenian Kabupaten Malang (DKKM) sebagai organisasi non-pemerintah namun merupakan kaki tangan pemerintah dalam menangani hal-hal berkaitan dengan masalah kebudayaan. Dengan demikian, pemerintah telah memiliki tidak dapat bekerjasama dengan DKKM (Dewan Kesenian Kabupaten Malang) dalam upaya melestarikan Topeng Malangan.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip - prinsip di dalamnya. Dan dari prinsip – prinsip inilah akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dapat dinilai bila pemerintah tersebut telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip - prinsip *Good Governance*.

Sedangkan Sekretariat pengembangan publik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappeda) menyatakan setidaknya ada 14 prinsip dalam wacana *Good Governance* yang dirangkum sebagai berikut:

1. Wawasan ke Depan (*visionary*)

Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi implementasi yang tepat sasaran.

2. Keterbukaan dan Transparansi (*openness and transparency*)

Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

3. Partisipasi Masyarakat (*participation*)

Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat.

4. Tanggung Jawab (*accountability*)

Instansi pemerintah dan para aparatnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan program, dan kegiatan yang dilakukannya.

5. Supermasi Hukum (*rule of law*)

Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan penyelenggaraan HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya - upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

6. Demokrasi (*democracy*)

Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri

oleh eksekutif. Keputusan – keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar - benar merupakan keputusan bersama.

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*professionalism and competency*)

Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

8. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi /kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakara untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

9. Keefisienan dan Kearifan (*efficiency and effectiveness*)

Pemerintah baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.

10. Desentralisasi (*decentralization*)

Pendelegasian tugas dan wewenang pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan public dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun daerah.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*provite sector and civil society partnership*)

Pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

12. Komite pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)

Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara adil dan proposional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya penciptaan kesetaraan dalam hokum (*equity of the law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environtmental protection*)

Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkenali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga – lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

14. Komitmen Pasar yang Fair (*commitment to Fair Market*)

Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antardaerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Berdasarkan prinsip *Good Governance* di atas, diharapkan pemerintah sebagai intitusi, mekanisme, proses-proses dan sistem dimana masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Sehingga pemerintah yang baik bermakna mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, dalam hal ini adalah melestarikan kebudayaan daerah itu sendiri.

Beberapa prinsip diatas telah merujuk pada tujuan dari penelitian ini berkaitan dengan pelestarian kebudayaan. Dalam melestarikan kebudayaan

daerah, perlu adanya wawasan ke depan, bagaimana memandang Topeng Malangan di masa depan. Sehingga berbagai kemungkinan dan resiko yang nantinya dihadapi, dapat diantisipasi sejak dini. Prinsip yang kedua adalah keterbukaan dan tranparansi. Keduanya harus dilakukan oleh pemerintah karena dengan *openness* masyarakat jadi mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga tidak menjadi masyarakat yang buta informasi. Transparansi berguna untuk memberikan kepercayaan pada pemerintah mengenai kebijakan yang di ambil.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu prinsip yang penting karena pemilik sah dari sebuah kebudayaan adalah masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya kebudayaan juga lahir dari sekelompok manusia yang hidup berdampingan. Bentuk partisipasi itu dapat berupa bagaimana kuantitas dari kebudayaan itu ditampilkan. Dengan demikian diharapkan kebudayaan akan tetap menjadi sajian khas dari suatu daerah.

Dalam melestarikan kebudayaan daerah, bentuk tanggung jawab dari pemerintah adalah dengan membuat suatu kebijakan berkaitan dengan perlindungan-perlindungan aset budaya bangsa agar kebudayaan tersebut tetap menjadi milik sah bangsa kita. Karena sebuah negara tanpa warisan budaya sama saja seperti negara tanpa sejarah.

Tanggung jawab pemerintah tersebut haruslah didukung dengan kinerja pemerintah yang profesional dan kompetitif. Profesionalisme diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara yang dituntut untuk selalu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mementingkan kepentingan

rakyat di atas kepentingan pribadi. Kebijakan-kebijakan yang di ambil juga harus berlandaskan kepentingan rakyat, karena dalam melestarikan kebudayaan daerah rakyat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh. Pemerintah juga harus kompetitif, bukan berarti persaingan, namun kembali bagaimana profesionalisme tersebut dijalankan.

Berkaitan dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat, terutama dalam pelestarian kebudayaan, pemerintah harus memiliki daya tangkap (*responsiveness*) yang cepat terhadap masalah tersebut. Dan tentunya harus tanggap juga terhadap keadaan masyarakatnya. Walaupun dituntut untuk berfikir cepat dan tanggap, pemerintah juga harus memperhatikan tingkat keefektifan dan efisiensi dari tindakan yang di ambil. Efektif berarti hasil dari kegiatan yang dilaksanakan dapat berguna dan efisien berarti kegiatan yang dilaksanakan tetap dan berguna.

Pelestarian kebudayaan disini akan lebih berjalan dengan sempurna apabila pemerintah dan masyarakat mampu bekerjasama dengan baik. Dengan adanya kemitraan tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam upaya pelestarian budaya dapat teratasi dengan tepat dan rasa memiliki antara pemerintah dan masyarakat terhadap kebudayaan dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga kebudayaan yang ada.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip *Good Governance*, perlu pula diketahui karakteristiknya yang akan menjadi tolok ukur kinerja dari pemerintah. Berikut adalah karakteristik *Good Governance* menurut UNDP :

1. Supremasi hukum (*Rule of law*)

Membangun sistem hukum yang sehat dengan adanya kejelasan dan prediktibilitas dari birokrasi terhadap sektor swasta dan dari segi masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga negara dalam menegakkan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini lebih ditekankan pada bagaimana hukum di Indonesia juga mengatur tentang pelestarian budaya.

2. Partisipasi (*participation*)

Syarat utama warga Negara dalam berpartisipasi:

- a. Ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
- b. Ada keterlibatan secara emosional antara pemerintah dan masyarakat sehingga ada *sense of belonging* terutama dalam keterikatan emosional terhadap kebudayaan daerah yang harus dijaga bersama.
- c. Memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya. Manfaat yang nantinya dapat dirasakan adalah keutuhan akan kebudayaan semakin terjaga dengan baik, karena jika kebudayaan telah dijaga dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat maka mustahil kebudayaan itu akan hilang begitu saja.

3. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi. Dalam

melestarikan kebudayaan, transparansi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah berupa tindakan yang jelas dalam menjaga budaya-budaya yang ada agar tidak terjadi pencurian budaya atau dijualnya budaya-budaya peninggalan bangsa yang seharusnya justru dijaga dengan baik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa lembaga-lembaga dan proses berusaha melayani semua stakeholder dalam jangka waktu yang wajar dan bergerak cepat dan tepat pada permasalahan yang terjadi dalam upaya pelestarian kebudayaan.

5. Berorientasi pada consensus (*Consensus Orientation*)

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda. Hal ini dilakukan demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, terutama mengenai kepentingan masyarakat dalam melestarikan budaya dan kebijakan-kebijakan yang diambil berkaitan dengan pelestarian tersebut.

6. Keadilan/kesetaraan (*Equity*)

Setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan individu berlainan namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan sering sejalan. Keadilan dan kesejahteraan bukan hanya diukur dari tingkat ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat, namun rasa aman dan perlindungan juga

dibutuhkan dari segala serangan modernisasi yang mengikis kebudayaan bangsa.

7. Keefektifan dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*)

Dalam upaya melestarikan kebudayaan, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintah harus membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya, misalnya para praktisi seni yang ada seoptimal mungkin agar pemerintah tahu mengenai bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam melestarikan kebudayaan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan di pemerintah dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah.

9. Visi strategis (*strategic Vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian terhadap kebudayaan tersebut. Dan visi tersebut harus berupa visi jangka panjang (*long-term vision*), visi jangka menengah (*mid-term vision*) dan visi jangka pendek (*short-term vision*).

Ciri – ciri visi yang baik antara lain:

- a. Bersifat spesifik
- b. Disusun dalam bahasa sederhana (kurang lebih 10 kata)
- c. Bersifat terukur
- d. Mungkin untuk dicapai
- e. Mempunyai dimensi waktu tertentu

Penjelasan mengenai karakteristik pemerintahan yang baik sangat sempurna jika dilaksanakan secara menyeluruh pula. Permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks yang terjadi dalam kehidupan bernegara tentunya juga dapat diatasi ketika terjalin sebuah kerjasama yang apik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri begitu juga dengan masyarakat yang tidak mungkin bergerak sendiri. Kerjasama seperti ini juga dibutuhkan dalam upaya pelestarian kebudayaan, karena kebudayaan bukan hanya milik pemerintah maupun masyarakat saja, namun kebudayaan merupakan milik bersama sebuah bangsa sebagai bentuk warisan leluhur yang menjadi identitas suatu bangsa.

3. Pilar – pilar *Good Governance*

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Berkaitan dengan pelestarian kesenian Topeng Malangan, jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Negara/Pemerintah
 - a. Menciptakan sosial yang stabil agar masyarakat memiliki pedoman hidup bermasyarakat yang kuat, yakni dengan memiliki kebudayaan sebagai identitas suatu kelompok.

b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan berkaitan dengan menjaga, melindungi, dan melestarikan kebudayaan, khususnya Topeng Malangan.

c. Menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable* agar kebudayaan tidak punah.

d. Menggerakkan sektor swasta agar terlibat dalam proses pelestarian Topeng Malangan.

e. Menyatukan swasta dan masyarakat dalam melestarikan budaya.

b) Sektor Swasta

a. Fasilitator yang mempromosikan Topeng Malangan sebagai salah satu pariwisata di Malang

b. Mengelola kebudayaan yang ada menjadi kunjungan wisata yang dicari wisatawan.

c. Membantu pemerintah dalam upaya menghidupkan kebudayaan yang ada, agar potensi daerah, terkait dengan budaya, dapat berkembang secara maksimal.

c) Masyarakat

a. Menjaga agar hak – hak masyarakat terlindungi, begitu juga dengan hak menikmati kebudayaan.

b. Mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan pelestarian Topeng Malangan.

c. Sebagai sarana *checks and balance* pemerintah. Berhasil tidaknya suatu kebijakan adalah ketika diimplementasikan kepada

masyarakat, masyarakat mampu menerima dengan baik. Begitu juga dengan kebijakan mengenai pelestarian Topeng Malangan, harus sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. Hal ini berguna ketika dalam proses pemerintah, apa saja yang telah dilakukan dalam melestarikan Topeng Malangan.

e. Mengembangkan SDM untuk menjaga eksistensi Topeng Malangan.

Dalam menciptakan suasana *Good Governance* dalam suatu negara, hendaknya hubungan yang terjalin antara ketiga sektor berjalan dengan baik. Namun dalam pelestarian kebudayaan ini, pilar-pilar *Good Governance* akan difokuskan pada dua sektor saja, yakni pemerintah dan masyarakat. Dengan fungsi :

1. Sektor Pemerintah

- a. Merumuskan kebijakan secara lebih mendetail mengenai pelestarian kebudayaan.
- b. Perlindungan dan pengakuan secara hukum terhadap kebudayaan yang ada.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam menampilkan kebudayaan yang ada.
- d. Bersama-sama dengan masyarakat, menjaga agar kebudayaan tetap lestari.

2. Sektor Masyarakat

- a. Melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka pelestarian budaya.
- b. Menjaga keberlangsungan kebudayaan dengan tetap melaksanakan kebudayaan yang ada.
- c. Menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah.
- d. Bersama-sama dengan pemerintah, menjaga agar kebudayaan tetap lestari.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa bernegara. Dan nilai *Good Governance* dapat diadopsi dalam rangka itu pengembangan dan penerapan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan kebudayaan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

C. Konsep Pelestarian

Pelestarian, dalam Kamus Bahasa Indonesia (Eko, 2006) berasal dari kata dasar *lestari*, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Jadi berdasarkan kata kunci *lestari*, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya. Demikian juga dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan, harus dilakukan secara terus-menerus.

Pada definisinya, pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.

Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan percerminan dinamika. (Soekanto, 2003: 432). Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau dilupakan.

Dalam hal ini pelestarian budaya (kesenian) Topeng Malang perlu perkembangan juga. Disesuaikan dengan selera masyarakat saat ini. Dengan demikian kesenian akan tetap hidup dalam kehidupan masyarakat.

D. Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan

Budaya bukan lagi kata yang asing. Seperti yang dikatakan oleh Silverman dan Ruggles (dalam Daniels, 2010 : 884), orang lebih mengenal budaya sebagai seni dan kerajinan material, keyakinan keagamaan, pertunjukan ritual, tarian, lagu, bahasa, sosial dibangun makna, dan memori

manusia, menyediakan konten untuk membangun pribadi dan identitas komunitas. Topeng Malangan juga dapat dikatakan sebagai ritual yang kemudian yang kemudian menjadi kebudayaan Malang.

Kebudayaan atau pun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat (Taylor dalam Soelaeman, 2007:19).

Menurut Edward Bunnet Taylor, kebudayaan didefinisikan sebagai kumpulan dari semua kemampuan dan kebiasaan yang diperlukan seorang manusia sebagai anggota dari masyarakat. Dari definisi jelas sekali posisi dan peran kebudayaan sebagai suatu yang membantu individu dalam bersosialisasi dengan masyarakatnya. Dalam pengertian seperti itu kebudayaan mengandalkan pada pembelajaran berkelanjutan terhadap tata kelembagaan dan tata nilai yang keduanya saling jalin-menjalin (Susanto, 2005:184). Berkaitan dengan penelitian ini pula, hubungan kelembagaan yang diharapkan dapat jalin-menjalin adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan.

Menurut Koentjaraningrat dalam Soelaeman (2007:21), kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta *budhayah*, yaitu bentuk jamak dari *budhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan akal”. Sedangkan kata “budaya” merupakan perkembangan majemuk dari “budi daya” yang berarti

“daya dari budi” sehingga dibedakan antara “budaya” yang berarti “daya dari budi” yang berupa cipta, rasa, dan karsa, dengan “kebudayaan” yang berarti hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan dan budaya itu memiliki arti yang sama.

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai kemenangan atau hasil perjuangan hidup, yakni perjuangan terhadap dua kekuatan yang kuat dan abadi, alam dan zaman. Kebudayaan tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus-menerus berganti-gantinya alam dan zaman (Widyosiswoyo, 2008:31). Begitu juga dengan Topeng Malangan, yang kian tahun kian mengalami perubahan sesuai jaman. Baik perubahan yang positif maupun saat-saat perubahan yang negatif.

Kebudayaan atau *culture* adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Topeng Malangan merupakan kebudayaan yang mengalami banyak perubahan. Kebudayaan sifatnya bermacam-macam, akan tetapi oleh karena semuanya adalah buah adab (keluhuran budi), maka semua kebudayaan selalu bersifat tertib, indah faedah, luhur, memberi rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat kebudayaan menjadi tanda dan ukuran tentang rendah-tingginya keadaban dari masing-masing bangsa.

2. Wujud Kebudayaan

Kebudayaan memiliki wujud yang tercermin langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan manusia. Berikut wujud dari kebudayaan :

1. Kompleks gagasan, konsep, dan pemikiran manusia : wujud ini disebut sistem budaya, sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat, dan berpusat pada

kepala-kepala manusia yang menganutnya. Disebutkan bahwa sistem budaya karena gagasan dan pemikiran tersebut tidak merupakan kepingan-kepingan yang terlepas, melainkan saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya, sehingga menjadi sistem gagasan dan pikiran yang relatif mantab dan kontinyu.

2. Kompleks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dapat diamati dan diobservasi. Wujud ini sering disebut sistem sosial. Sistem sosial ini tidak dapat melepaskan diri dari sistem budaya. Apapun bentuknya pola-pola aktivitas tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan-gagasan, dan pemikiran-pemikiran yang ada didalam kepala manusia. Karena saling berinteraksi antara manusia, maka pola aktivitas dapat pula menimbulkan gagasan, konsep, dan pikiran baru serta tidak mustahil dapat diterima dan mendapat tempat dalam sistem budaya dari manusia yang berinteraksi tersebut.
3. Wujud sebagai benda. Aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil dari karya manusia untuk mencapai tujuannya. Aktivitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk fisik yang konkret biasa juga disebut kebudayaan fisik, mulai dari benda yang diam sampai pada benda yang bergerak (Soelaeman, 2007:2).

Topeng Malangan merupakan kebudayaan yang kompleks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dalam kegiatan istana, bersifat konkret, dapat diamati. Wujud ini sering disebut sistem social. Dalam mempelajari tentang wujud kebudayaan dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa wujud kebudayaan terdiri dari tiga, yaitu :

1. Sistem budaya

Sistem budaya merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. sistem budaya merupakan ide-ide dan gagasan manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Gagasan tersebut akan berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk sebuah aturan atau kebudayaan tertentu. Fungsi dari sistem budaya ini adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan

serta tingkah laku manusia dalam kehidupan. Dan dari sinilah norma, adat istiadat, dan pranata terbentuk.

2. Sistem sosial

Sistem sosial disini adalah bagaimana sebuah masyarakat hidup dalam suatu sistem. Sistem tersebut yang akan menghubungkan satu dengan yang lain dalam menjalani kehidupan. Sistem sosial disini dapat berupa hubungan antara dua orang, kelompok kecil, keluarga, organisasi besar, dan masyarakat.

3. Kebudayaan fisik

Kebudayaan fisik adalah seluruh hasil dari kebudayaan baik benda diam, maupun kesenian dalam bentuk gerak.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka wujud kebudayaan dari Topeng Malangan yang akan lebih ditonjolkan adalah kebudayaan fisik, yakni berupa seni gerak yang indah (tarian). Wujud tersebut akan memberi manfaat sebagai hiburan yang dapat dilihat secara visual.

3. Unsur-unsur Kebudayaan

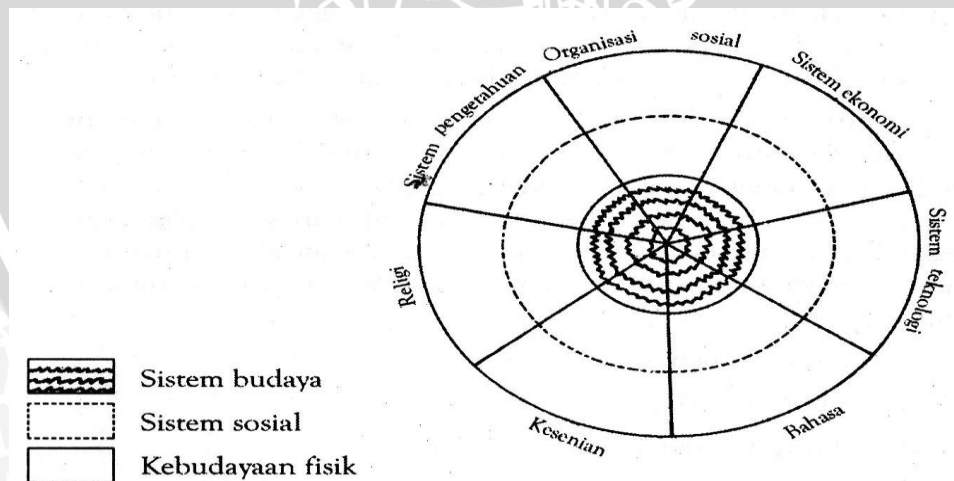
Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan di dunia, baik yang kecil, bersahaja, dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan jaringan hubungan yang luas. Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan disini lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, dikenal adanya unsur-unsur yang

universal yang melahirkan kebudayaan universal (*cultural universal*), seperti yang Malinowski (Soelaeman, 2007:23) kebudayaan di dunia mempunyai tujuh unsur universal, yaitu:

1. Bahasa
2. Sistem teknologi
3. Sistem mata pencaharian
4. Organisasi sosial
5. Sistem pengetahuan
6. Religi
7. Kesenian

Dalam unsur kebudayaan, banyak faktor yang melingkupi didalamnya. Hubungan antara faktor-faktor tersebut digambarkan dalam sebuah kerangka kebudayaan. Dan gambar dari kerangka tersebut menurut Koentjaraningrat (dalam Soelaeman, 2007:23) adalah :

Gambar 1. Kerangka Kebudayaan



Kerangka kebudayaan merupakan dimensi analisis dari konsep kebudayaan yang dikombinasikan ke dalam suatu bagan lingkaran. Bagan lingkaran ialah untuk menunjukkan bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis.

Kerangka kebudayaan digambarkan dalam tiga lingkaran konsentris. Sistem budaya digambarkan dalam lingkaran yang paling dalam dan merupakan inti, sistem sosial dilambangkan dengan lingkaran kedua di sekitar inti, sedangkan kebudayaan fisik dilambangkan dengan lingkaran yang paling luar. Unsur kebudayaan universal yang tujuh macam itu dilambangkan dengan membagi lingkaran tersebut menjadi tujuh sektor yang masing-masing melambangkan salah satu dari ketujuh unsur tersebut. Maka terlihat jelas bahwa tiap unsur kebudayaan yang universal itu dapat mempunyai tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial, dan sistem fisik.

4. Kebudayaan tradisional (Kebudayaan Daerah)

Kebudayaan daerah terkait erat dengan kearifan lokal. Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan maka kebudayaan akan mengalami *reinforcement* secara terus-menerus menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu maka kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Artinya sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga mengalami penguatan secara terus-menerus. Dalam pengertiannya (dalam artikel *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafatii*) kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan

kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kebudayaan daerah adalah kebudayaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tertentu. Topeng Malangan sendiri sampai saat ini adalah hasil budaya yang turun-temurun dari jaman kerajaan. Budaya daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah mulai terlihat berkembang di Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal ini dapat dilihat dari cara hidup dan interaksi sosial yang dilakukan masing-masing masyarakat kerajaan di Indonesia yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan kebudayaan daerah kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok tertentu di suatu daerah dan dilakukan secara turun temurun guna menjaga kebudayaan tersebut.

5. Kesenian

a. Definisi Kesenian

Seni memiliki banyak pengertian dalam beberapa literatur, kata seni berasal dari kata "sani" yang artinya "Jiwa Yang Luhur/ Ketulusan jiwa" (Arini, 2009:10). Kata seni dalam bahasa Inggris *art* yang artinya adalah barang/atau karya dari sebuah kegiatan. Konsep seni terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Beberapa pendapat tentang pengertian seni (Arini, 2009:10):

- a. Ensiklopedia Indonesia : Seni adalah penciptaan benda atau segala hal yang karena kendahan bentuknya, orang senang melihat dan mendengar
- b. Aristoteles : seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu,
- c. Ki Hajar Dewantara : seni adalah indah, menurutnya seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya,
- d. Akhdiat K. Mihardja : seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani sipenerimanya.
- e. Erich Kahler : seni adalah suatu kegiatan manusia yang menjelajahi, menciptakan realitas itu dengan symbol atau kiasan tentang keutuhan "dunia kecil" yang mencerminkan "dunia besar".

Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan.

Kebudayaan dan seni adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seni lahir dari hasil kebudayaan dan seni yang akan membuat sebuah kebudayaan

menjadi lebih lebih indah. Seni menurut Terry dalam Syafiie (2006:6), *art is personal creative power skill in performence*, maksudnya seni adalah kekuatan seseorang yang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan karyanya. Sehingga, seni merupakan kemampuan dan kemahiran dari seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang seniman. Dan kesenian adalah salah satu sisi dari kebudayaan manusia secara umum, karena dengan berkesenian merupakan salah satu bentuk peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan cita-cita dengan berpedoman pada nilai-nilai yang berlaku dan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis kesenian antara lain :

1. Seni musik
2. Seni rupa
3. Seni pertunjukan
4. Seni tradisional
5. Seni kontemporer

Dari jenis kesenian di atas, Topeng Malangan merupakan sebuah seni pertunjukan, karena Topeng Malangan merupakan sebuah drama tari dengan cerita berlaton didalamnya.

Untuk menjaga Topeng Malangan yang telah mentradisi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk melestarikan kesenian perlu sebuah komitmen yang tinggi yang masyarakat selaku pemilik dari kesenian tersebut dan juga pemerintah selaku pihak yang berguna untuk menjaga sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Ketika kedua pihak ini telah mampu menjalankan fungsi masing-masing maka secara tidak langsung

sinergi di antaranya akan terjalin dengan baik dalam melestarikan kesenian yang ada.

b. Seni pertunjukan

Seni pertunjukan (*performance art*) adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. *Performance* biasanya melibatkan empat unsur, yaitu : waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton. Menurut Achsan Permas, organisasi seni pertunjukan melingkupi organisasi tradisional maupun modern yang berbentuk sanggar tari, teater, grup musik dan seni suara, yang mempertunjukan hasil karya seninya secara komersial maupun non komersial untuk suatu tontonan atau tujuan lain (Permas, 2003:7).

Meskipun seni *performence* bisa juga dikatakan termasuk didalamnya, kegiatan-kegiatan mainstream seperti teater, tari, musik, dan sirkus, tapi biasanya kegiatan-kegiatan seni tersebut pada umumnya lebih dikenal dengan istilah ‘seni pertunjukan’ (*performing arts*). Seni *performance* adalah istilah yang biasanya mengacu pada seni konseptual atau *avant garde* yang tumbuh dari seni rupa yang kini beralih ke seni kontemporer. Saat ini Topeng Malangan merupakan sebuah pertunjukan yang masih kental dengan tradisi kedaerahan dan menjadi sebuah hiburan/ tontonan bagi masyarakat.

E. Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat

1. Kemitraan

Menurut Sulistyani (2004:129) kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam penelitian ini juga akan dijelaskan mengenai kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih, merupakan pemerintah dan masyarakat.
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. Tujuan bersama pemerintah dan masyarakat adalah melestarikan Topeng Malangan.
- c. Ada kesepakatan. Secara tertulis, memang tidak ada kesepakatan, namun secara moril, kesepakatan itu telah tertanam dalam masyarakat dan pemerintah.
- d. Saling membutuhkan. Baik dari pemerintah maupun masyarakat memiliki peran masing-masing yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling membutuhkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dalam hal ini kaitannya dengan melestarikan budaya dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra yaitu pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian hendaknya kerja sama ini memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan dan merugikan. Untuk terjadinya suatu kemitraan baik dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan kemitraan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak – pihak yang bermitra dengan visi atau misi yang berbeda asalkan tetap saling mengisi, melengkapi secara fungsional.

Kemitraan merupakan sebuah kebutuhan pada dewasa ini. Akan terjadi banyak penghematan energi dan akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika para pihak yang memiliki kesamaan visi dan orientasi melakukan kemitraan. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau subordinat, memiliki kesamaan misi ataupun visi yang berbeda maupun saling mengisi atau melengkapi secara fungsional. Kesamaan visi tersebut adalah dalam melestarikan kebudayaan daerah. Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kemitraan agar tujuan tersebut tercapai dengan maksimal, karena kedua sektor ini memiliki peran yang juga besar terhadap pelestarian kebudayaan, terutama Topeng Malangan. Pemerintah sebagai fasilitator dan

masyarakat secara luas sebagai pemilik dari kebudayaan. Dan kebudayaan wajib dilestarikan agar suatu bangsa tidak melupakan jati dirinya.

2. Prinsip Kemitraan

Hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya (Adi Candra Utama, 2006 : 51) :

(1) Saling Percaya dan Menghormati

Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Mengingat posisi dan perannya yang sangat penting secara kelembagaan, kemitraan tidak akan terjadi di antara pihak-pihak yang sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai kepada kondisi yang paling tinggi, yaitu saling percaya dan penghormatan satu sama lain. Dengan spirit saling percaya dan penghormatan inilah, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kemitraan akan dengan mudah melakukan kerja sama melalui praksis berbagai peran, tugas, kewenangan, dan juga melibatkan pertukaran sumber daya.

(2) Otonomi dan Kedaulatan

Salah satu komponen penting yang menjadi penyusun bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan atas otonomi kelembagaan. Dengan prinsip itu pula, sebuah hubungan kemitraan selayaknya dibangun dan dijalankan melalui kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Prinsip kedua ini secara *logic* merupakan implikasi dari adanya prinsip yang pertama. Dengan adanya saling percaya dan menghormati, pihak-pihak yang membangun kemitraan akan dengan sendirinya memahami dan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanpa perlu mencampuri satu terhadap yang lain.

(3) Saling Mengisi

Kemitraan dalam pengertian sebagai “interaksi” yang melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak atas kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus melihat adanya “kelebihan” pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan demikian kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi pada semua aspek yang

diperlukan untuk itu sehingga diperoleh pencapaian tujuan yang lebih besar dan bermakna pada pengertiannya yang paling luas.

(4) Keterbukaan dan Pertanggungjawaban

Meskipun kemitraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya bukan berarti pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang dijalankannya. Untuk maksud menjamin berjalannya kemitraan sesuai dengan maksud dan tujuannya, diperlukan adanya prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud dan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggung jawaban terhadap semua pelaksanaannya pada tataran praksis. Berjalannya kedua prinsip tersebut di atas akan menjadikan kemitraan menjadi sebuah pilihan rasional dalam menjalankan relasi kelembagaan yang sehat dan positif.

Dalam melestarikan kesenian Topeng Malang, prinsip-prinsip diatas sangat penting. Sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terjalin antara sinergi pemerintah dan masyarakat, maka kemitraan dalam melestarikan kesenian juga akan berjalan baik pula.

3. Model-Model Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan dengan banyak cara. Sehingga munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut ini yang diilhami dari fenomena biologis. Untuk itu kemudian sumber ini (Sulistiyani, 2004:129) mencoba mengangkat fenomena biologis yang ada di dalam khasanah kehidupan organisme ke dalam pemahaman akan dunia organisme baik yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat dilihat, kemitraan dibedakan menjadi:

- a) *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu
- b) *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik

c) *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan semu adalah merupakan suatu kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pada satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah kerjasama yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dari semacam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu mengerti dan memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. Kemitraan semu semacam ini tampaknya terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman Orde Baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi/kelompok atau lebih yang memiliki yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama.

Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh, sehingga sekaligus saling menjang satu dengan yang lainnya.

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut, maka suatu organisasi atau kelompok-kelompok ataupun perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Dalam melestarikan Topeng Malangan, kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat adalah kemitraan mutualistik yang merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal, yaitu melestarikan Topeng Malangan.

4. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat

Kemitraan sebagai jalinan kerja sama senantiasa menempatkan pihak – pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi, dan selaras. Seperti yang dijelaskan oleh (Mustafa, 2008:67) pada hakekatnya interaksi (*interaction*) yang dimaksud disini merupakan hubungan yang tersusun atau terbentuk dari perwujudan peran yang dimainkan pelaku (*role play*), yang berlangsung secara dinamis dan meliputi hubungan antara orang – orang

perorangan, antara kelompok – kelompok manusia, maupun antara orang dengan perorangan dengan kelompok manusia dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Interaksi disini lebih merujuk kepada konsekuensi logis peran yang harus dinyatakan keluar secara konkrit dan ini tidak dimaksud sebagaimana penjelasan interaksinya para interaksionis simbolis dalam menjelaskan masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat merupakan mitra kerja di dalam pembangunan nasional, terutama pembangunan bidang kebudayaan, khususnya kesenian Topeng Malang. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, sehingga kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sinergi berasal dari kata *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Hanya dengan bekerja bersama-sama tujuan dapat tercapai. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan, sedangkan bersinergi berarti melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Sinergi bukan kompromi, pihak-pihak yang terlibat harus bisa saling bekerja sama. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

Siapapun yang terlibat dalam sinergi harus menerapkan beberapa prinsip dasar berikut agar sinergi yang dibentuk bisa memberikan hasil yang optimal, yaitu :

1. Kesediaan untuk saling berbagi

Dengan saling berbagi ide, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman maka sinergi bisa dilakukan. Dari sinilah kekuatan dari sinergi itu dapat ditemukan. Tanpa kesediaan saling berbagi ini, berarti sinergi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pelestarian budaya, pemerintah tentunya memiliki strategi tersendiri, begitu masyarakat yang mengetahui secara mendalam mengenai kebudayaan, sehingga jika keduanya disatukan, akan diperoleh sebuah kebijakan yang akan menguntungkan pihak pemerintah maupun masyarakat.

2. Berfikir meneng

Dalam bersinergi (bermitra) tidak ada pihak yang harus kalah ataupun pihak yang dirugikan. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dapat menikmati kemenangan dan keuntungan yang jauh lebih besar dari pada jika mereka mengerjakannya sendiri. Dengan demikian, dalam melakukan sinergi semua pihak harus saling berpikir positif agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tanpa suatu beban yang berarti. Walaupun biasanya pemerintah merasa memiliki kewenangan, namun tetap saja dalam pelestarian kebudayaan, masyarakat juga harus dilibatkan dan pemerintah tidak semena-mena dalam mengambil keputusan.

3. Menghargai perbedaan

Sebenarnya sinergi adalah menghargai perbedaan, dengan perbedaan inilah sinergi tersebut ada. Pemerintah dan masyarakat adalah dua golongan yang berbeda, namun bukan berarti pendapat masing-masing patut dipertahankan secara egois, perlu adanya saling menghargai. Apalagi masalah budaya adalah masalah yang kompleks. Terlebih dari perbedaan fungsi masing-masing lembaga, sehingga dengan perbedaan tersebut sebuah kerjasama dapat dilakukan agar memperoleh *'the best way'* melalui ide kreatif bersama dalam melaksanakan tujuan, yaitu melestarikan Topeng Malang.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pelestarian kebudayaan. Dimana kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang tak pantas jika ditinggalkan begitu saja menjadi sejarah tiada arti. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mampu menggerakkan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Jadi metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan langkah-langkah sistematis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam studi kasus ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, karena peneliti bermaksud menggambarkan tentang hubungan kemitraan antara sektor pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian yang dilakukan pada salah satu kesenian asli Malang yakni Topeng Malangan. Sedangkan data yang diungkap merupakan data kualitatif tanpa perhitungan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia online disebutkan bahwa pengertian dari deskriptif adalah “bersifat menggambarkan apa adanya”, dengan kata lain metode deskriptif diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan dari suatu masalah yang digambarkan keadaan objeknya tersebut pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan.

Riset kualitatif memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadian langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa sepersis kenyataannya, yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat, dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipasif di dalam berbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya (Gorman & Clayton dalam Santana, 2007:29).

Dengan penelitian deskriptif dan menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti telah menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan hasil dari penelitian mengenai sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Faisal dalam Sugiyono (2008:29) adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan feasibilitas (adanya sumber daya) masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu.

Fokus penelitian disini adalah suatu objek yang merupakan tujuan utama untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi atau sedang berlangsung di suatu daerah, terutama di Malang. Penetapan fokus ini bertujuan untuk mengungkapkan

data-data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis dengan teori yang digunakan yaitu, Administrasi Pembangunan, *Good Governance*, Kebudayaan, dan Kemitraan dalam penelitian ini. Adapun fokus yang telah diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat, dapat dilihat dari :
 - a. Peran pemerintah dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
 - b. Peran masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
 - c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
2. Faktor yang menjadi pendukung daan penghambat dalam sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan, ditinjau dari :
 - a. Faktor internal, yaitu faktor dari dalam yang meliputi sumber daya manusia serta *stakeholder* yang terlibat dalam pelestarian kesenian Topeng Malangan.
 - b. Faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang meliputi peraturan daerah, sistem prosedur dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang telah diteliti untuk mendapatkan data-data yang valid, akurat, yang benar-benar diperlukan untuk penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Malang.

Sedangkan situs penelitian dilakukan pada :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
2. Sanggar Seni Topeng Malangan.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam proses pengumpulan data yang telah dilakukan di lapangan, peneliti telah memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat sehingga dapat dijadikan sumber informasi dalam menunjang penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, dalam penelitian ini telah dikelompokkan dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informan atau wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah :

a. Aparatur / birokrat.

- Aparatur dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, yakni Kabid Budaya, Ibu Dyah Sulistya.
- Staf Kabid budaya dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Ibu Lanie
- Penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ibu Yun Marhaeni

b. Praktisi kesenian Topeng Malangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah :

- a. Arsip-arsip yang dimiliki oleh sumber data primer yaitu arsip-arsip dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang akan diteliti. Berupa, Peraturan Perundangan dan data-data kesenian Kabupaten Malang.
- b. Data lain yang menunjang, yaitu buku, majalah, dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulam data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti telah memakai beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan langsung oleh pewawancara, dalam hal ini peneliti sendiri, kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam. Hasil dari wawancara tersebut merupakan data mentah yang telah dianalisis kembali oleh peneliti dengan menggunakan teori yang telah disebutkan sebelumnya.

Wawancara telah dilakukan dengan aparatur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan praktisi seni Topeng

Malangan. Wawancara juga telah dilakukan pada masyarakat sebagai salah satu variabel yang dituju dalam penelitian ini dan para pecinta seni Topeng Malangan.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti, tanpa mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun objeknya adalah orang (Marzuki, 2005). Dengan observasi ini, telah menggunakan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai sinergi masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Observasi tentunya akan dilakukan oleh peneliti dari pengamatan terhadap keadaan yang saat ini tengah terjadi pada kesenian Topeng Malangan. Mulai dari tanggapan pemerintah yang berwenang sampai dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan dan *sense of belonging* dari masyarakat mengenai kesenian Topeng Malangan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan pengumpulan data dari dokumen, berupa arsip yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, majalah, dan dokumentasi yang masih terkait dengan penelitian mengenai sinergi masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai instrumen utama (*instrumen guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati fenomena mengenai Topeng Malang dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Pengamatan yang dilakukan telah disesuaikan dengan tujuan daripada penelitian itu sendiri.

Kendala yang terjadi saat penelitian ini dilakukan adalah kekurangan data yang membuat peneliti harus mencari kembali, sumber-sumber mana saja yang patut di masukkan dalam penelitian ini. Sehingga observasi tempat harus dilakukan kembali.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Wawancara telah dilakukan pada perangkat pemerintahan yang bertugas dalam pelestarian kebudayaan, yang hal ini dilakukan pada aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, masyarakat dan para praktisi seni. Pedoman wawancara akan berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian.

Selama penelitian ini dilakukan, kesulitan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan wawancara adalah ketidakpaduan jadwal dari peneliti sendiri dengan responden. Sehingga perlu banyak waktu untuk menunggu keterpaduan jadwal tersebut.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat oleh peneliti pada saat pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif. Misalnya, melihat secara langsung pertunjukan Topeng Malangan, mendatangi tempat pembuatan Topeng Malangan, mengamati suasana pada saat latihan, dan lain sebagainya. Hasil dari catatan ini dianalisis sehingga nantinya dapat memberi hasil tentang penelitian, terutama berkaitan dengan pelestarian kesenian dalam perpektif (*Good Governance*) dengan menggunakan prinsip kemitraan.

G. Analisa Data

Proses penganalisaan data merupakan merupakan kegiatan yang amat penting dalam suatu metode penelitian, karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Bogman dan Biklen (dalam Arifin, 1994:77) mendefinisikan bahwa, “Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain”. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode dari dari Miles dan

Huberman (dalam Sugioyo 2009:91), biasa disebut dengan metode interaktif, yang menyatakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan, yaitu *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*. Penjelasananya adalah :

- 1) *Data Reduction* adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah (*raw method*) yang terdapat dalam buku catatan lapangan. Seperti hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil penelitian. *Data reduction* berlangsung terus-menerus dalam keseluruhan perjalanan proyek penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mempertajam, menetapkan fokus dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik atau diverifikasi. Data-data yang dipilih harus sesuai dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
- 2) *Data display* adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bahasa mudahnya adalah menyajikan seluruh data yang telah direduksi. Dengan memeriksa data *display* akan memudahkan memahami apa yang sedang terjadi dan harus melakukan apa (analisis lebih lanjut atau tindakan). *Data display* yang ada dalam penelitian ini adalah :
 - a. Peran pemerintah dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
 - b. Peran masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.
 - c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

d. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan

3) *Conclusion drawing* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan akhir dari kegiatan analisis. Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti, kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan kolega peneliti. Dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan tidak untuk menjadikan hasil penelitian ini sebuah kebenaran yang absolut tetapi semata-mata untuk menuliskan hasil penelitian. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah pembacaan terhadap keseluruhan penelitian, dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah berdasarkan fokus penelitian, dan satu kesimpulan teoritis yang menyangkut seluruh aspek penelitian, yakni berkaitan dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta data fokus penelitian. Sebelum disajikan data dari fokus penelitian, maka berikut ini akan disajikan data gambaran umum lokasi dan situs penelitian terlebih dahulu.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terkenal sebagai daerah dengan suasana yang dingin dan sejuk. Banyak terdapat hutan dan gunung-gunung yang mengitarinyai karena memang secara geografis Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi bagian tengah Propinsi Jawa Timur. Pegunungan yang mengelilingi Kabupaten Malang adalah Pegunungan Tengger disebelah timur yang memiliki dua gunung terkenal yaitu Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Kawi dan Gunung Kelud disebelah barat serta Gunung Arjuno dan Welirang disebelah utara. Sedangkan untuk posisinya terletak pada ordinat $112^{\circ} 17' 10,9''$ – $112^{\circ} 57' 0.0$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44'' 55.11''$ – $8^{\circ} 26' 35.45''$ Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Batu, Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Kabupaten Malang memiliki luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, dari 38 Kabupaten/ Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Malang adalah 351.456,99 km². Dari seluruh total luas tersebut sekitar 54,93% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sedangkan pemanfaatan untuk pemukiman baru sekitar 13,71%.

Kabupaten Malang berkembang bersama 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan bergandengan erat dengan Kota Malang dan Kota Batu di Malang raya. Kabupaten Malang secara keseluruhan terdiri dari 33 Kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara rinci terdiri dari 12 kelurahan, 377 desa, 3.138 rukun warga dan 14.346 rukun tetangga.

Topografi Kabupaten Malang terdiri atas daerah lembah atau dataran rendah yang terletak pada ketinggian 250-500 m diatas permukaan air laut. Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut, adapula daerah dataran tinggi, daerah perbukitan kapur, daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno 500-3300m diatas permukaan air laut, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur 500-3600m diatas permukaan air laut.

2. Kondisi Seni Budaya

Kabupaten Malang memang terkenal dengan kerajaan-kerajaan yang pernah ada. Yang paling terkenal adalah kerajaan Singhasari. Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 1222). Dan berkembangnya sejarah kerajaan diatas tidak dapat dilepaskan pula dengan cerita sejarah kesenian yang berkembang di Malang. Kesenian ini pulalah yang mencerminkan bagaimana kebudayaan yang diproduksi selama masyarakat masih ada.

Kesenian yang saat ini masih sangat melekat di masyarakat Malang adalah kesenian Topeng Malangan. Pada dasarnya Topeng adalah seni pertunjukkan yang sangat populer di Indonesia, bahkan genre pertunjukkan tersebut merupakan salah satu yang tertua, yaitu sebagai seni panggung yang terkait dengan adat tradisi ritual. Topeng dipahami sebagai hasil pahatan yang menyerupai wajah, bahkan profil yang diukirkan adalah mempresentasikan keseluruhan pribadi (profil muka), maka topeng dapat dikenali sebagai

keseluruhan pribadi seseorang, artinya topeng adalah menggambarkan karakteristik atau kepribadian seseorang.

Istilah tentang pertunjukkan topeng ternyata beragam. Pertunjukan bertopeng itu mempunyai peran yang tidak kecil dalam masyarakat Indonesia, setidaknya sebagai fenomena religi sekaligus memiliki kaitan erat dengan seni pertunjukkan.

Pertunjukkan topeng yang berkembang di Malang masih dipengaruhi oleh mitologi tentang dewa-dewa Hindu yang tidak hanya sebagai media pemujaan, tetapi para dewa dianggap beringkarnasi dalam kehidupan nyata. Maka dewa-dewa yang sangat populer seperti Raja Erlangga yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu, Ken Arok yang dikenal sebagai putra Dewa Brahma, dan masih banyak lagi. Tetapi berdasarkan keyakinan masyarakat Tengger, masyarakat yang diyakini memiliki kaitan dengan masyarakat Majapahit, mentabukan untuk menggelar kisah-kisah dewa dan lebih senang untuk menggelar pertunjukkan topeng yang menceritakan leluhur mereka dari Kerajaan Kediri. yaitu kisah tentang *Panji (Epos Panji, yaitu kisah petualangan Panji Inukertapati dalam mencari istrinya, Dewi Sekartaji).*

Kesenian yang berkembang di Kabupaten Malang sebenarnya sangat banyak, terlebih untuk kesenian tari. Namun banyak pula yang sudah tidak terjaga lagi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, kesenian tari yang ada di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data sanggar seni tari tahun 2010

No.	Nama Sanggar	Alamat	Pimpinan
1.	Padepokan Seni Gita Laras	Desa Sambigede Kec.Sumberpucung	Bambang Supomo, SPd. Msi.
2.	Sanggar Mudra Ganesha	Jl. RS. Lama RT/RW 24/11	Hj. Jumiarah
3.	Padepokan Seni Asmorobangun	Kedungmonggo, pakisaji	Suroso, Spd. Msi
4.	Padepokan Seni Mangundharmo	Tumpang	Sholeh Adi Pramono, S.Si
5.	Padepokan Seni Wijaya Kusuma	Jl. Kusnan Marjuk 146 Poncokusumo	Sholeh Adi Pramono, S.Si
6.	Galuh Candra Kirana	Jambuwer, kromengan	Djiono Barjo
7.	Laras Aji	Jambuwer, kromengan	Eko Ujang
8.	Tawangargo	Karangploso	Yuni
9.	Girimoyo	Karangploso	Evi
10.	Puspitasari	Sumberpucung	Endang

11.	Madyo Laras	Sumberpucung	Susilo
12.	Proboretno	Turen	Ade Irma
13.	Turtanpada	Dusun Madyoreng. Turen	Dra. Diana Ida
14.	Citra Pinasthika	Jl. Setiawan 245 Tumpang	Tri Wahyuningtyas, SPd. Msi
15.	Simadyo Utomo	Tumpang	Utomo
16.	Adininggar	Singosari	Pompong Supardjo
No.	Nama Sanggar	Alamat	Pimpinan
17.	Banjararum	Desa Banjararum, Singosari	Taisun
18.	Bintang Kecil	Singosari	Winarto Ekhrum
19.	Kartika	Cepokomulyo, Kepanjen	Siyanto
20.	Ragil Kuning	Tajinan	Isna
21.	Kreatif	Donomulyo	Agus
22.	Gita Rama	Donomulyo	Adi Gunawan
23.	Teater Class	Pagak	Ibnu Citra Hidayat

24.	Kanjuruhan	Lawang	Tatik
25.	Warisan Amiseno	Jabung	Warisan
26.	Gunung Kawi	Wonosari	Roro Yusworini
27.	Pijiombo	Wonosari	Indra
28.	Puspo Widari	Pagelaran	Supatin
29.	Setyo Budoyo	Tulus besar	Amin

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang tahun 2010

Menurut data diatas, sanggar seni tari yang tahun 2010, ada 29 sanggar. Semuanya terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Namun tidak semua dari sanggar tersebut khusus menangani Topeng Malangan. Dari data di atas, sanggar yang khusus melestarikan Topeng Malangan ada enam sanggar. Yaitu, Padepokan Seni Asmorobangun, Mangundharmo, Wijaya Kusuma, Galuh Candra Kirana, Laras Aji, dan Setyo Utomo. Dari keenam sanggar tersebut, semua merupakan sanggar seni yang khusus menampilkan kesenian Topeng Malangan. Sanggar-sanggar tersebut dapat dikatakan masih maju. Dari pemerintah sendiri selalu berusaha melibatkan sanggar-sanggar Topeng Malangan yang ada apabila ada acara tentunya yang berkaitan dengan Topeng Malangan. Menurut keterangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, yang dapat paling maju adalah sanggar Asmorobangun yang terletak di Desa Kedungmonggo.

Sanggar-sanggar lain seperti Mangundharmo, Setyo Utomo, tetap bertahan walaupun tidak semaju Asmorobangun. Di Mangundharmo masih sering juga mengadakan latihan-latihan walaupun sebagian besar barang-barang juga telah dijual dikarenakan permasalahan intern yang terjadi di sanggar tersebut. Sanggar seni Setyo Utomo tetap menjaga kesenian Topeng Malangan dengan serius, karena Mbah Rasimun, juga merupakan empu dari Topeng Malangan, Disana sering mengadakan pemetasan pada saat *haul* dari mbah Rasimun. Dalam penelitian ini, penulis memilih enam sanggar yang dijadikan situs penelitian.

Secara historis, Topeng Malangan merupakan tradisi kultural dan religiusitas masyarakat Jawa semenjak kerajaan Kanjuruhan yang dipimpin oleh Raja Gajayana semasa abad ke-8 M. Pada waktu itu topeng masih terbuat dari batu. Kemudian pada masa Raja Darmawangsa (947-990 M), raja kerajaan Kediri, topeng mulai dibuat dari kayu dengan tetap menjadikan topeng sebagai bagian dari ritual. Topeng mulai berubah menjadi topeng pertunjukan istana. Berawal dari Raja Darmawangsa yang menikahkan putrinya dengan anak lelaki saudaranya (Mahendratta) yang bernama Airlangga. Semenjak raja Airlangga bertahta topeng terus dijadikan sebagai pertunjukkan yang ditarikan dan diiringi musik serta diberi cerita. Pada waktu itu cerita yang sering digunakan adalah cerita Ramayana dan Mahabarata.

Seiring dengan perkembangannya, terutama di Malang, cerita yang lebih sering digunakan adalah cerita Panji. Cerita Panji adalah kisah sekitar raja-raja Kediri. Saat ini, perkembangan pertunjukkan dijadikan sebagai hiburan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suroso, pemilik sanggar seni Asmorobangun, bahwa saat ini Topeng Malangan digunakan sebagai hiburan, misalnya dalam pernikahan, sunatan, atau acara-acara yang lain. Beliau juga menjelaskan bahwa, pertunjukkan Topeng Malangan saat ini dikemas berbeda dengan masa mbah Karimun (kakek dari Bapak Suroso). Dulu, pertunjukkan Topeng Malangan tidak begitu memperhatikan busana, karena yang ditonjolkan adalah cerita dan karakteristik lakon yang dimainkan. Saat ini, para seniman berusaha mengemas pertunjukkan dengan semenarik mungkin, mulai dari busana harus terlihat bagus, kemudian cerita yang disampaikan juga beragam. Hal ini bertujuan agar orang yang melihat pertunjukkan Topeng Malangan tidak merasa bosan.

B. Gambaran Situs Penelitian

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

1) Landasan Hukum Institusi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata adalah dua dinas yang digabung. Sebelumnya urusan kebudayaan digabung dalam pendidikan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. dan berdasarkan peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sekarang dilegalisasi menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

2) Kedudukan

Berpedoman pada peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008, kedudukan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang adalah :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab langsung Bupati melalui Sekretariat Daerah.

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang adalah berikut :

Tugas pokok :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- i. Pembinaan UPTD.
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata.
- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata.
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.
- n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya.

- o. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.

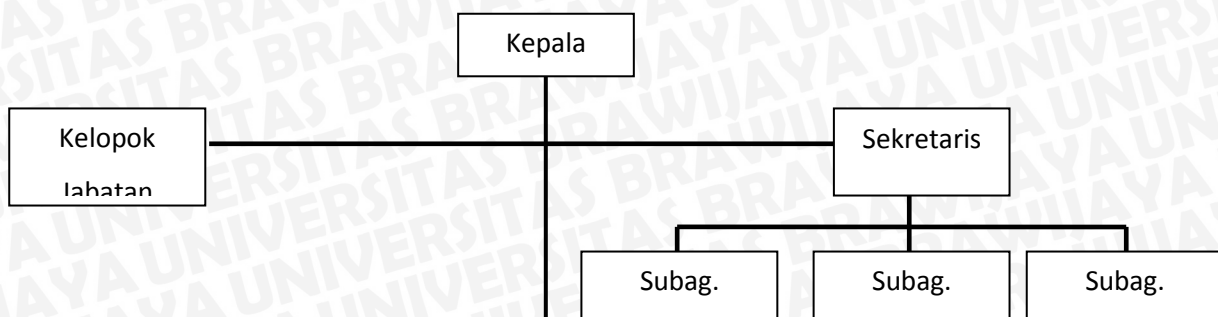
Beberapa tugas dan fungsi yang telah dijelaskan diatas merupakan tugas yang diberikan oleh Bupati yang tertuang Peraturan Bupati kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Peraturan tersebut diberikan agar dalam melaksanakan tugasnya, dinas yang terkait dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

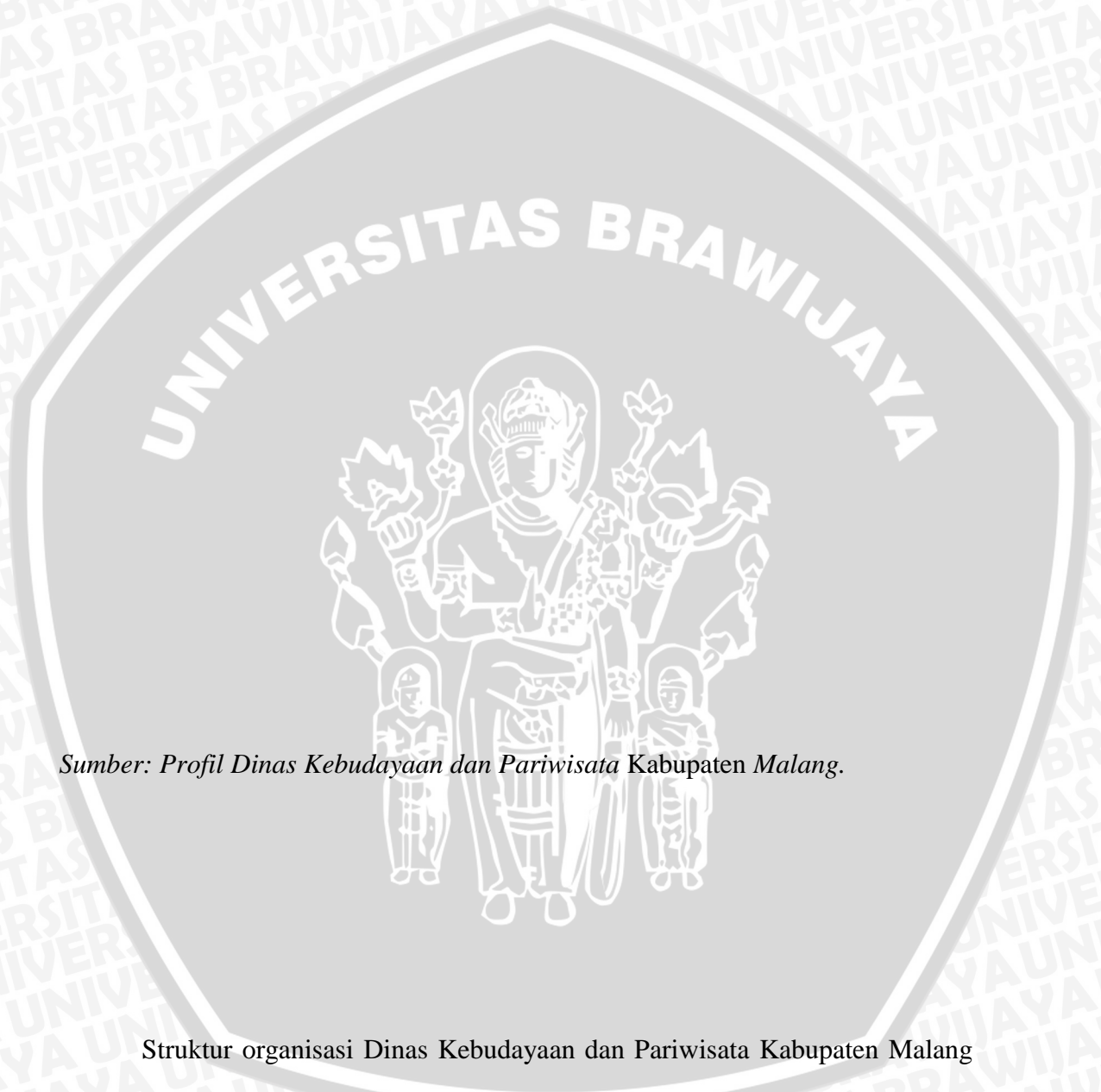
Peraturan yang tertuang diatas merupakan Peraturan Bupati, sedangkan Peraturan Daerah masih dalam proses penyusunan. Karena memang dinas terkait belum memiliki peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Bupati yang kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

4) Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 aalah sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang





Sumber: Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yakni kepala dinas sebagai pimpinan yang memberikan instruksi secara langsung kepada para kepala jabatan, sekretaris, dan kepala bidang.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui masing-masing tugas sebagai berikut:

Tugas dari masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

Bidang Kebudayaan

1. melaksanakan sebagian tugas Dinas kebudayaan dan Pariwisata;
2. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pelayanan bidang kebudayaan;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Kesenian;

Dengan tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi kesenian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis serta sarana pengembangan di bidang kesenian berdasarkan usul dari unit kerja terkait;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian;
- g. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. merekomendasikan usul pemberian bantuan kepada organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian serta izin tugas tenaga teknis;
- i. memberi layanan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian;
- j. menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- k. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan memberi bantuan kepada sanggar seni budaya dan upacara tradisional;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Bahasa

Dengan tugas

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan Bahasa sebagai pedoman tugas;

- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bahasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis serta sarana pengembangan di bidang bahasa berdasarkan usul dari unit kerja terkait;
- d. mengurus penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang bahasa di sekolah-sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang bahasa;
- g. memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan badan dan organisasi serta lembaga yang bergerak di bidang pengembangan bahasa;
- h. merekomendasi usul pemberian bantuan kepada organisasi dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang bahasa;
- i. memberi layanan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan di bidang bahasa;

- j. menyusun laporan seksi pengembangan bahasa sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional, Permuseuman dan Kepurbakalaan.

Dengan tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi Sejarah Nilai tradisional, Permuseuman dan keurbakalaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, keurbakalaan dan peninggalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keurbakalaan dan peninggalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis serta sarana pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keurbakalaan dan peninggalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa, kepurbakalaan dan peninggalan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan peninggalan nasional.
- g. meningkatkan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan peninggalan nasional;
- h. membantu merekomendasi usul pemberian bantuan kepada organisasi dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan peninggalan nasional serta izin teknis tugas belajar tenaga teknis;
- i. memberi layanan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepurbakalaan dan peninggalan nasional;

- j. menyusun laporan seksi sejarah Nilai tradisional, permuseuman dan Kepurbakalaan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam perkembangannya, tugas yang telah tertulis diatas belum sepenuhnya telah dijalankan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain keterbatasan dana dari pemerintah sendiri, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan fasilitas yang kurang memadai pula. Dengan keadaan yang demikian, pemerintah tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan baik.

Bidang Objek Wisata

Bidang Objek Wisata mempunyai tugas :

1. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang usaha jasa dan sarana wisata
2. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pelayanan bidang obyek wisata
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

Bidang Obyek Wisata terdiri dari :

1. Seksi Obyek Wisata dan Pentas Seni Budaya;

Dengan tugas :

- a. menyusun rencana dan program Seksi Obyek Wisata dan Pentas Seni Budaya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional;
- b. melaksanakan program pembinaan pengembangan obyek wisata dan pentas seni budaya;
- c. melaksanakan pemberian izin usaha wisata dan pentas seni budaya;
- d. melaksanakan standart pelayanan minimal di bidang obyek wisata dan seni budaya;
- e. menyusun rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha di bidang obyek wisata dan seni budaya
- f. menyusun jadwal pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang obyek wisata dan seni budaya;
- g. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan obyek wisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Rekreasi dan aneka Hiburan;

Dengan tugas :

- a. menyusun rencana dan melaksanakan program kerja Seksi rekreasi dan Aneka Hiburan;

- b. mengumpulkan dan menyusun bahan terkait program kerja di Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi program pengembangan rekreasi dan aneka hiburan;
- d. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan di bidang Rekreasi dan Hiburan ;
- e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan rekreasi dan aneka hiburan;
- f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap perkembangan rekreasi dan aneka hiburan ;
- g. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan rekreasi dan aneka hiburan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi lingkungan Usaha Obyek Wisata

Dengan tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Lingkungan Usaha Obyek Wisata;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Lingkungan Usaha Obyek Wisata;
- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi program pengembangan Lingkungan Usaha Obyek Wisata

- d. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan di bidang Lingkungan Usaha Obyek Wisata;
- e. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap Lingkungan Usaha Obyek Wisata;
- f. menyusun dan menyiapkan bahan pembinaan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup dan Analisa mengenai dampak lingkungan hidup di bidang usaha obyek wisata;
- g. memberikan rekomendasi dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup dan analisa mengenai dampak lingkungan hidup di bidang lingkungan usaha obyek wisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Berkaitan dengan judul penelitian, bidang objek wisata ini bukan merupakan bahasan utama. Namun dalam penanganan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata objek wisata merupakan masalah serius yang juga membutuhkan perhatian pemerintah. Mengingat wilayah Kabupaten Malang adalah daerah yang kaya akan objek wisata, maka hal ini akan memudahkan pihak pemerintah dalam meningkatkan wisata kabupaten Malang. Tinggal bagaimana pemerintah mengeloladan mengembangkan objek wisata yang telah ada. Jika telah diolah dengan baik, maka akan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Malang.

Bidang Pemasaran

Bidang pemasaran mempunyai tugas :

1. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang Pemasaran Wisata;
2. melaksanakan kegiatan pemasaran/promosi di bidang pariwisata;
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Pemasaran terdiri dari :

1. Seksi Informasi dan Promosi;

Dengan tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Informasi dan Promosi;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan terkait program kerja di Seksi Informasi dan Promosi;
- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi di bidang Informasi dan Promosi Pariwisata;
- d. menyusun menyiapkan bahan Informasi dan Promosi pariwisata;
- e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait program kerja di Seksi Informasi dan promosi;
- f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap informasi dan promosi pariwisata;

- g. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan informasi dan promosi pariwisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemasaran Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata mempunyai tugas :

Dengan tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan terkait program kerja di Seksi Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata;
- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi pengembangan Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata;
- d. menyusun menyiapkan bahan terkait program kerja di Seksi Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata;
- e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait program kerja di Seksi Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata
- f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap Informasi dan promosi Pariwisata
- g. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan Pemandu Wisata dan Perjalanan Wisata;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemasaran Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Analisa Pemasaran Wisata antar daerah dan Lembaga.

Dengan tugas :

a. menyusun dan melaksanakan program kerja Seksi Analisa Pemasaran Wisata Antar Daerah dan Lembaga;

b. mengumpulkan dan menyusun bahan Analisa Pemasaran Wisata Antar Daerah dan Lembaga;

c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi pengembangan program kerja Analisa Pemasaran Wisata Antar Daerah dan lembaga;

d. menyusun menyiapkan bahan terkait program kerja di Seksi Analisa pemasaran Wisata Antar Daerah dan Lembaga;

e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan da pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait Analisa Pemasaran Wisata dan Lembaga;

f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap Analisa pemasaran Wisata Antar Daerah dan lembaga;

g. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan Analisa pemasaran Wisata Anatr Daerah dan Lembaga;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Pemasaran adalah cara yang tepat untuk mempromosikan budaya maupun pariwisata. Oleh karena itu, bidang pemasaran juga diambil alih oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pemasaran sangat menentukan dikenal tidaknya sebuah budaya maupun pariwisata. Cara pemasaran yang baik dibutuhkan dalam proses ini. Dengan pemasaran yang baik, maka budaya maupun pariwisata dapat dikenal masyarakat secara luas.

Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata

Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata mempunyai tugas :

1. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang usaha jasa dan sarana wisata
2. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pelayanan bidang obyek wisata
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Usaha Jasa dan sarana Wisata terdiri dari :

1. Seksi Usaha Akomodasi Makanan dan Minuman;

Dengan tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja akomodasi, makanan dan minuman;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan terkait program kerja di Seksi Akomodasi, Makanan dan Minuman;

- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi di bidang usaha akomodasi, makanan dan minuman;
- d. menyusun menyiapkan bahan terkait program kerja di seksi Akomodasi, Makanan dan Minuman;
- e. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap kegiatan usaha jasa dan sarana wisata;
- f. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan usaha jasa dan sarana wisata;
- g. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan usaha jasa dan sarana wisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Jasa dan Sarana Wisata;

Dengan tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja usaha jasa dan sarana wisata;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan terkait program kerja di seksi Jasa dan Sarana Wisata;
- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi di bidang usaha seksi jasa dan sarana wisata;

- d. menyusun menyiapkan bahan terkait program kerja di seksi jasa dan sarana wisata;
 - e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait program kerja di jasa dan sarana wisata;
 - f. melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap kegiatan usaha jasa dan sarana wisata;
 - g. menetapkan kebijakan kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan kegiatan usaha jasa dan sarana wisata;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Jasa Dan Sarana Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Lingkungan Aneka Usaha Jasa dan sarana Wisata, Akomosadi, Makanan dan Minuman.

Dengan tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja lingkungan aneka usaha jasa dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman;
- b. mengumpulkan dan menyusun bahan terkait program kerja di Seksi Lingkungan aneka jasa dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman;
- c. melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi di bidang usaha Seksi Lingkungan aneka usaha jasa dan sarana wisata, akomodasi , makanan dan minuman;

- d. menyusun menyiapkan bahan terkait program kerja di seksi lingkungan aneka jasa usaha dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman;
- e. melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait program kerja di seksi lingkungan aneka usaha jasa dan sarana wisata, akomodasi, makanan dan minuman;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam bidang usaha dan jasa wisata, berkaitan dengan pemasaran dan objek wisata yang ada. Oleh karena itulah bidang ini juga ditangani langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Usaha dan jasa wisata yang ada di Kabupaten Malang telah cukup banyak. Dalam sebuah objek wisata pastinya disana juga menyediakan usaha jasa, dapat berupa *Guide* wisata, atau pusat informasi, dan jika dalam sarana wisata pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai bagi para wisatawan.

Dengan manajemen yang baik, maka keempat bidang yang ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat berjalan dengan baik dan mampu menjadikan Kabupaten Malang menjadi pusat budaya dan pariwisata yang ada. Dan tentunya hal ini akan berpengaruh juga terhadap pendapatn asli daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan warganya juga.

C. Penyajian Data

1. Sinergi antara Pemerintah dan masyarakat

a. Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan, tentunya sangat berpengaruh terhadap segala kehidupan pemerintahan, terlebih dalam pelestarian budaya. Di Kabupaten Malang, juga telah ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai sebuah lembaga yang akan menangani langsung urusan-urusan kebudayaan dan pariwisata. Sesuai dengan penelitian mengenai pelestarian Topeng Malangan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang kurang memiliki banyak program dalam upaya pelestarian ini. Kurangnya program yang dijalankan ini memang dikarenakan dalam dinas yang terkait belum ada suatu kebijakan khusus mengenai pelestarian kesenian. Selama ini yang menjadi pedoman adalah peraturan Bupati yang berupa uraian tugas Pokok dan Fungsi. Pemerintah menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan materi yang digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan baru berupa peraturan daerah.

Dari tugas pemerintah yang telah tercantum di Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008, belum semua telah dilakukan oleh pemerintah. Diawali dengan yang pertama yaitu penyusunan program kerja. Dari pihak Dinas kurang terbuka mengenai program kerja dengan alasan program yang dilaksanakan selalu kondisional, tergantung dengan

anggaran dan kapasitas yang ada saat itu. Berikutnya adalah melakukan pembinaan. Hal itu telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Pembinaan dilakukan terhadap para seniman dengan mengirimkan para seniman dalam acara-acara kesenian di propinsi ataupun nasional, seperti yang disampaikan oleh Kabid Kebudayaan ibu Dyah :

“biasanya kita mengirim para seniman pada event-event yang diadakan oleh propinsi maupun di Malang sendiri” (wawancara 4 April 2011 pukul 10.00 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang).

Pengiriman itu dilakukan secara bergantian dari keseluruhan sanggar-sanggar yang ada. Salah satu acara propinsi yang dilakukan dengan pengiriman seniman adalah FKKS (Festival Kesenian Kawasan Selatan) yang dilaksanakan pada bulan November 2010 di Lumajang. Dari Kabupaten Malang mengirimkan kurang lebih 25 orang dari sanggar Asmorobangun Kedungmonggo. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4
Suasana Festival Kesenian Kawasan Selatan



Sumber : Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gambar di atas menunjukkan bahwa para penari Topeng Malangan melakukan kirab di jalan dalam rangka FKKS tersebut. Mereka menari sepanjang jalan, dan dilihat oleh masyarakat sekitar. Pengiriman seniman tersebut bertujuan agar kesenian yang ada di Malang dapat menjaga eksistensi ditingkat propinsi. Selain pengiriman seniman di acara-acara propinsi, pemerintah juga mengadakan pembinaan terhadap para seniman. Bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah dengan kunjungan ke sanggar-sanggar. Pada tahun 2011 ini pemerintah mengadakan pembinaan di Kecamatan Kepanjen pada bulan Mei yang diikuti oleh seluruh seniman di wilayah Kecamatan Kepanjen, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 5
Suasana Pembinaan di Kepanjen



Sumber : Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan diadakannya acara-acara seperti yang tertera di atas, merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebudayaan, khususnya kesenian Topeng Malang yang ada di Kabupaten Malang. Dapat diketahui pula bahwa yang menjadi narasumber dari pembinaan tersebut adalah Pak Suroso yang juga merupakan pemilik sanggar seni Asmorobangun. Dan didampingi pula oleh pihak pemerintah.

Mengirim seniman di acara-acara seperti itu telah dapat dikatakan sebagai bentuk pembinaan terhadap seniman Topeng Malang. Dan juga pernah beberapa kali diundang apabila pemerintah mengadakan suatu acara. Berikut adalah serangkaian acara yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pelestarian kebudayaan :

Tabel 2
Serangkaian Kegiatan Tahun 2010

No	Acara	Waktu	Tempat	Keterangan
	Pembinaan Seni Budaya	Mei 2010	Kecamatan Sumberpucung	-
2.	Penilaian Panji-Keberhasilan Pembangunan Bidang Seni Budaya	Mei 2010	Seluruh Kecamatan se Kabupaten	Pemerintah yang mengadakan Kunjungan
3.	HUT Kertanegara	Agustus 2010	Kabupaten Jembrana	Berkaitan dengan Topeng Malang
4.	Penerimaan Penghargaan /	Agustus 2010	Surabaya	-

	Tali Asih dari Gubernur			
5.	Festival Ludruk	Oktober 2010	Jombang	-
6.	Festival Kesenian Kawasan Selatan	November 2010	Lumajang	Berkaitan dengan Topeng Malangan
7.	Kirab Budaya Agung	November 2010	Malang	Berkaitan dengan Topeng Malangan
8.	Lomba Jaranan	November 2010	Malang	HUT Kabupaten Malang
9.	Gebyar Pentas Seni Rakyat	November 2010	Malang	HUT Kabupaten Malang
10.	Pagelaran Wayang Kulit	November 2010	Malang	HUT Kabupaten Malang

Sumber : Data diolah dari hasil Wawancara dengan Staf bidang budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel diatas, kegiatan yang berkaitan dengan Topeng Malangan sebagai objek dalam penelitian ini, hanya dalam beberapa kegiatan saja. Yang lain merupakan kebudayaan umum yang ada di Kabupaten Malang. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa kegiatan yang diikuti merupakan kegiatan yang telah ada, bukan kegiatan sendiri yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas hanya sebagai fasilitator yang menangani permintaan-permintaan dari pihak yang terkait.

Pemerintah juga memberlakukan KNIK (Kartu Nomor Induk Kesenian) sebagai upaya untuk merapikan masyarakat yang memiliki

kelompok seni. Hal ini juga dilakukan guna memenuhi tugas pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, yakni memberikan layanan teknis dalam pengembangan kesenian. Tujuan Dari KNIK ini adalah untuk melegalkan perkumpulan seni yang ada di Kabupaten Malang. Pemberian KNIK ini dilakukan kepada mereka yang mendaftarkan diri secara sukarela. Setelah mendaftar, maka mereka akan mempunyai KNIK dan dengan demikian keberadaan mereka diakui oleh pemerintah. Hal ini untuk mempermudah pemerintah apabila ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesenian. Namun tidak semua kelompok seni mendaftarkan diri. Tercatat pada tahun 2010 hanya ada 436 perkumpulan yang mendaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Dengan demikian, KNIK akan merapikan sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Malang. Dan juga merupakan legalitas dari sanggar-sanggar yang ada.

Dalam dunia pendidikan di Kabupaten Malang, pembelajaran Topeng Malangan tidak secara khusus diajarkan dalam kurikulum. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yun Marhaeni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang :

“Selama ini Topeng Malangan memang tidak ada dalam kurikulum pendidikan di Kabupaten Malang. Topeng Malangan dikenalkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya di sekolah-sekolah itu masuk ekstra tari. Namun yang diajarkan bukan Topeng Malangan saja, melainkan tari-tari yang ada di Malang”, (wawancara dilakukan tanggal 1 Juni 2011, pukul 19.00 di rumah Ibu Yun).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui Topeng Malangan masuk dalam pendidikan di Kabupaten Malang melalui ekstrakurikuler.

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan di luar kurikulum dan diberikan diluar jam pelajaran. Pelestarian yang ada dalam dunia pendidikan ini akan bersifat sementara jika hanya dimasukkan dalam ekstrakurikuler. Jika dimasukkan dalam kurikulum, maka setiap generasi akan menerima pelajaran tersebut. Dengan demikian setiap siswa yang duduk di bangku sekolah akan mendapatkan pembelajaran mengenai kesenian Topeng Malang.

Berkaitan dengan sinergi antara dan masyarakat, sejauh ini pemerintah belum pernah mengadakan interaksi langsung kepada masyarakat mengenai keinginan yang berhubungan dengan pelestarian Topeng Malang. Pemerintah hanya mengikutkan masyarakat, dalam hal ini seniman, untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah saja. Sejauh ini hanya sekitaran itu saja yang dilakukan pemerintah dalam upaya pelestarian Topeng Malang tersebut.

Dalam pendanaan yang berkaitan dengan anggaran untuk kesenian, pihak dinas kurang begitu terbuka dengan masalah tersebut. Hal ini diungkapkan sebagai hal yang tidak bisa dikonsumsi publik. Namun pihak dinas menyatakan bahwa anggaran untuk kesenian selalu ada (tanpa menyebut angka). Hal ini tidak sesuai dengan tugas dari dinas terkait yang seharusnya memberikan rekomendasi bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan sanggar. Pemberian bantuan yang harusnya rutin dilakukan ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam beberapa acara, pemerintah telah mampu memberi bantuan walaupun tidak terlalu banyak. Terbukti

dengan pementasan rutin yang diadakan di areal stadion Kanjuruhan setiap malam minggu. Pementasan yang ditampilkan bukan hanya Topeng Malangan saja, melainkan seluruh kesenian yang ada di Malang. Pendanaan juga ditangani langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah dalam melestarikan kesenian Malang.

Berbicara mengenai kesenian daerah, tentunya berkaitan dengan pariwisata daerah. Kaitannya dengan kesenian Topeng Malangan adalah saat ini Topeng Malangan menjadi salah satu ciri khas kesenian yang dimiliki Malang raya. Dan seharusnya pula, Topeng Malangan ini menjadi salah satu penarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Malang. Namun yang selama ini membuat Malang ramai dikunjungi wisatawan bukan karena Topeng Malangannya, tetapi karena tempat wisatanya yang indah. Topeng Malangan belum masuk pada sektor bisnis pariwisata yang ada di Malang. Sehingga keduanya, pariwisata dan kesenian Topeng Malangan, seperti berjalan sendiri-sendiri.

b. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* utama (primer) dalam upaya pelestarian kesenian Topeng Malangan. Pada hakekatnya masyarakatlah yang berhubungan langsung dengan kebudayaan tersebut.

Dan yang tengah terjadi di Kabupaten Malang, masyarakat itu sendiri hanya sebagian kecil saja yang masih peduli terhadap pelestarian kesenian Topeng Malangan. terbukti masih banyaknya sanggar seni khusus Topeng

Malangan yang masih bertahan. Sanggar-sanggar yang masih bertahan antara lain Sanggar Seni Asmorobangun. Sanggar tersebut terletak di Dusun Kedungmonggo Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dusun Kedungmonggo merupakan salah satu daerah pertumbuhan wayang topeng di Kabupaten Malang yang tergolong tua. Hingga saat ini sudah mencapai generasi ke-5.

Letak Dusun Kedungmonggo di sebelah utara berbatasan dengan Dusun Jatisari, di sebelah timur, berbatasan dengan Dusun Bendo, di sebelah barat berbatasan dengan Dusun Permanu dan di sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Lowok. Sehingga dari letaknya inilah yang menjadikan dusun ini seolah-olah sebagai dusun pusat. Inilah yang disebut dengan desa konsentris.

Pendirian sanggar Asmorobangun ini sendiri, dilakukan pada tahun 1982 atas bantuan dari Bupati Malang pada saat itu, yaitu Edi Selamat yang berupa pendapa berukuran 15x15 m, diatas tanah seluas 25x40 m. Pendapa ini didirikan diatas tanah milik anak mbah Karimoen yang bernama Gini. Pada tahun-tahun itulah kesenian topeng maupun kerajinan topeng dirasakan mempunyai peluang yang besar untuk menjadi barang kerajinan.

Pada awalnya, perkumpulan wayang Topeng Malangan di dusun ini dirintis oleh seorang warga yang bernama Kek Serun. Serun dan keluarganya adalah keturunan etnik Madura. Pada akhirnya memang mayoritas penduduk Kedungmonggo bagian timur adalah berdarah

Madura. Karakteristik ini mempengaruhi pada teknik tari topeng yang dikuasai warga sekitar Kedungmonggo. Sehingga gaya tari Topeng Malangan yang ada disini lebih tampak kasar dibanding gaya tari Topeng Malangan yang ada di daerah Malang bagian timur yang cenderung lebih halus.

Perkembangan Topeng Malangan yang ada di dusun ini, dirasa memiliki perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan sanggar yang lain. Masih ada latihan rutin yang diadakan disana, baik untuk anak-anak maupun remaja. Ada pula yang datang memang untuk mempelajari tari Topeng Malangan ini. Untuk terus menjaga eksistensi dari Topeng Malangan ini, para pengurus sanggar yang dipimpin oleh Bapak Suroso, tetap berusaha mengadakan pertunjukan kecil-kecilan yang biasa disebut *senin legian*. Pertunjukkan *senin legian* ini diadakan setiap hari senin legi. Dengan segala keterbatasan yang ada, pertunjukkan ini terus dipertahankan. Berikut adalah jadwal pertunjukkan di sanggar Asmorobangun selama tahun 2011 :

Tabel 3
Jadwal pertunjukan (Senin Legian) di sanggar Asmorobangun
Kedungmonggo-Kabupaten Malang

No.	Tanggal	Waktu	Lakon	Pemain
1.	2 Januari	15.30	Walang Wati – Walang Semirang	Wayang topeng anak-anak
2.	6 Februari	19.30	Ronggeng Roro Tangis – Ronggeng Roro Jiwo	Wayang topeng remaja dan

				dewasa
3.	13 Maret	15.30	Jenggolo Mbangun Candi	Wayang topeng anak-anak
4.	17 April	19.30	Sekartaji Palsu (episode 1 lakon Panjilaras)	Wayang topeng remaja
5.	22 Mei	19.30	Lahire Panjilaras (episode 2 lakon Panjilaras)	Wayang topeng remaja
6.	26 Juni	19.30	Sayembara Sodolanang	Wayang topeng dewasa
7.	31 Juli	15.30	Gunung Sari – Ragil Kuning	Wayang topeng anak-anak
8.	4 September	19.30	Panjilaras Kembar (episode 3 lakon Panjilaras)	Wayang topeng remaja
9.	9 Oktober	19.30	Panjilaras Adu Jago (episode 4 lakon Panjilaras)	Wayang topeng remaja
10.	13 November	19.30	Maeso Suro Leno	Wayang topeng remaja dan dewasa
11.	19 Desember	19.30	Umbul-umbul Mojopuro	Wayang topeng remaja dan dewasa

Sumber: Data Diolah dari pengamatan peneliti di sanggar Seni Asmorobangun-Malang

Pertunjukan yang telah tertera di atas merupakan pertunjukan bulanan yang di adakan sanggar Asmorobangun. Segala macam kebutuhan dipenuhi sendiri oleh pengurus sanggar. Tidak ada campur tangan swasta maupun pemerintah dalam kegiatan ini. Pemilik sanggar mengakui bahwa kebutuhan tersebut masih bisa ditanggung sanggar. Pengeluarannya antara lain adalah untuk menyiapkan konsumsi bagi tamu yang datang. Pertunjukan yang setiap diadakan tersebut bertujuan agar para seniman baik yang masih belajar maupun yang telah mahir, termotivasi utuk terus mengadakan latihan. Sehingga dari hasil latian yang dijalankan selama ini, kemudian dipentaskan setiap bulannya. Terlebih bagi pemula, tentunya ini akan sangat memberikan pengalaman berharga. Kesenian akhirnya bisa menjadi suatu motivasi tersendiri.

Dengan demikian, eksistensi Topeng Malangan di Dusun Kedungmonggo ini merupakan harapan yang besar bagi perkembangan topeng yang ada di Malang.

Secara moril kesenian harus dilestarikan turun menurun agar tidak sampai putus. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suroso, pemiliki padepokan Asmorobangun dalam wawancara yang menyatakan bahwa :

“Bagaimanapun kesenian ini harus dijaga. Dan kesenian ini dapat tetap hidup apabila masyarakat disekitarnya mendukung. Tidak dapat dipungkiri, kalau kesenian ini hidup dikalangan seperti kalangan pondok pesantren, pasti kesenian ini tidak akan hidup” (wawancara 17 April 2011 pukul 18.00 di rumah Bapak Suroso).

Hal ini disebutkan oleh bapak Suroso karena memang begitulah kenyataan yang ada dimasyarakat kita. Di daerah Dusun Kedungmonggo, masyarakatnya adalah masyarakat yang masih kental dengan tradisi-tradisi kedaerahan. Beliau juga menyebutkan bahwa seperti di daerah Bululawang, kesenian-kesenian daerah tidak akan hidup, karena disana memang daerah yang banyak terdapat pondok pesantren dan pastinya masyarakatnya tidak akan terlalu peduli dengan kesenian. Hal itu merupakan salah satu contoh hidupnya kebudayaan di Malang.

Masyarakat di daerah Kedungmonggo, terutama sekitar area sanggar sangat bangga terhadap daerahnya tersebut yang terkenal justru dengan adanya sanggar Asmorobangun. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga bernama Pak Seno, yaitu :

“Dengan keberadaan sanggar disini, saya tidak merasa terganggu sama sekali. Saya dan warga sekitar justru senang dengan keberadaannya sanggar yang memang karena itulah daerah ini dikenal dimana-mana. Kalau ini tidak ada, mungkin desa ini tidak akan terkenal dan sepi. Dan lebih banyak keuntungan. Apalagi dengan adanya kegiatan-kegiatan membuat kampung ini selalu ramai. Dan mohon maaf mbak, kita ini sebagai orang desa senang kalau masuk TV atau ada liputan-liputan tentang kampung sini. Dan sering juga turis-turis berkunjung disini, dan kita bangga dengan itu”
(wawancara 12 Juni 2011 pukul 09.00 di halaman rumah Bapak Seno).

Dari pernyataan tersebut, tentunya masyarakat sekitar sanggar begitu bangga dengan kampung mereka yang terkenal dengan kebudayaannya. Selain itu juga, hampir seluruh warga kampung di sekitar sanggar pasti

pernah belajar mengenai Topeng Malangan. walaupun tidak semahir seniman topeng pada umumnya tapi mereka pernah mencicipi *asiknya* belajar Topeng Malangan. Hal seperti ini memang merupakan sebuah dukungan tersendiri bagi eksistensi Topeng Malangan. Seperti juga yang telah dijelaskan diatas bahwa kebudayaan tidak akan hidup tanpa lingkungan yang mendukungnya. Dan masyarakat disekitar Kedungmonggo sangat mendukung keberasaaan sanggar seni tersebut.

Sanggar lain adalah Mangundharmo di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang. Sanggar ini dipimpin oleh Bapak Sholeh. Di masyarakat Malang Pak Sholeh terkenal sebagai seniman yang bukan hanya aktif di kesenian tetapi juga karena pernikahan beliau dengan seorang warga asing yang akhirnya berprofesi sebagai sinden. Di sanggar tersebut masih sering pula di adakan latihan-latian rutin dan Pak Sholeh sendiri yang mengajar. Namun saat peneliti mengunjungi sanggar tersebut, suasana disana terlihat lebih sepi. Kegiatan yang ada di sanggar ini sudah tidak seramai dulu. Terbukti pada saat peneliti mengunjungi sanggar, disana sedang diadakan renovasi sanggar, membersihkan dan memperbaiki kayu-kayu yang mulai rapuh. Berikut merupakan wawancara dengan Pak Sholeh :

“mungkin karena sudah tua, dan sudah mulai jarang digunakan untuk pertunjukan yang besar, makanya kurang enak dipandang seperti ini. Dan barang-barang yang ada dirumah saya juga sudah mulai laku, hal itu karena bagaimanapun saya harus berbagi dengan mantan istri saya. Dulunya segala kebutuhan tentang Topeng Malangan ada disana”, (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2010 di sanggar Mangundharno pukul 10.00).

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setelah permasalahan keluarga yang dialami oleh Bapak Sholeh, ternyata juga sedikit mempengaruhi kegiatan yang ada di sanggar tersebut. Bukan mati, tapi kegiatan yang ada disana tetap berusaha bertahan dengan segala keterbatasan yang ada. Dari Bapak Sholeh sendiri masih sering mengajar diluar sanggar sebagai pengajar Topeng Malangan. Begitu juga dengan sanggar Wijaya Kusuma yang ada di Poncokusuma. Sanggar tersebut juga dipimpin oleh Bapak Sholeh. Dan kegiatan kesenian disana hampir sama dengan yang ada di Mangundharmo. Karena memang satu kepemimpinan, dan dari pihak pemerintah apabila ingin menghubungi sanggar Mangundharmo atau Wijaya Kusuma melalui Bapak Sholeh. Kedua sanggar tersebut juga masih sering mengikuti kegiatan pemerintah.

Sanggar lain yang masih bertahan adalah sanggar Galuh Candra Kirana dan Laras Aji. Kedua sanggar tersebut berada di Dusun Jambuwer, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sanggar Galuh Candra Kirana dipimpin oleh Pak Djiono dan anaknya yang bernama Eko mendirikan sanggar lagi dengan nama Laras Aji. Dusun Jambuwer ini letaknya jauh keramaian kota. Walaupun letaknya jauh, namun disana masih ada kegiatan berkaitan dengan Topeng Malangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Eko seperti dibawah ini :

“Disini memang tidak semaju di Kedungmonggo, namun disini masih tetap melakukan latihan-latihan rutin. Biasanya yang latihan disini adalah warga disekitar sini saja. Kadang kala juga sering diminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengisi acara. Pernah juga mahasiswa jurusan seni tari yang magang disini. Lalu kemudian anak saya juga ikut mendirikan sanggar, ya walaupun sebennya sama saja

antara sanggar saya dan sanggar anak saya”, (wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2010 di salah satu rumah warga di Desa Petungroto pukul 15.00).

Di sanggar ini memang tidak semaju sanggar di kedungmonggo maupun yang lain. Perhatian pemerintah terhadap sanggar ini juga sebatas mengikutkan para seniman Jambuwera dalam acara-acara pemerintah. Pemerintah juga pernah mengadakan kunjungan rutin disana. Sedangkan di sanggar Setyo Utomo di Glagahdowo, Kecamatan Tumpang, yang dipimpin oleh Bapak Utomo masih sangat aktif. Eksistensi sanggar ini dibuktikan dengan adanya pementasan setiap tahun, yakni setiap acara *haul* orang tua dari Bapak Utomo. Pemerintah juga sering mengundang sanggar ini pada acara pemerintah. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Utomo :

“Biasanya saya diminta dinas untuk ikut ke Surabaya atau ketempat lain. Banyak lah. Kalau mereka butuh seniman, ya saya saja yang datang, tapi kalau butuh penari ya saya ajak anak-anak yang ada disini. Kalau pementasan yang rutin itu diadakan setahun sekali pada saat haul orang tua saya atau semacam peringatan kematian, (wawancara pada 25 Maret di Batu)”

Beda dengan masyarakat di sanggar, permasalahan yang terjadi di masyarakat luas adalah kurangnya pengenalan sejak dini mengenai kebudayaan, sehingga sampai saat ini, yang mengenal kesenian topeng dengan fasih hanyalah orang-orang tertentu saja. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Yulia Widiastuti sebagai penikmat seni dari kalangan mahasiswa :

“Apa sebenarnya Topeng Malangan itu? Kita sebagai penikmat seni tidak tahu dengan jelas apa itu Topeng Malangan. Bagaimana asal usulnya, bagaimana ceritanya, karakternya apa saja, yang tahu

hanyalah orang kalangan tertentu, ya orang-orang yang bergelut di kebudayaan itu. Saya sebagai penikmat seni, tidak pernah paham betul mengenai Topeng Malangan. Saya hanya tahu bahwa Topeng Malangan memang berasal dari Malang, hanya sekedar itu saja". (wawancara 19 Mei 2011 pukul 11.00 di kantin Universitas Brawijaya).

Dari sedikit pembicaraan tersebut, bahwa sebenarnya masyarakat sendiri kurang begitu mengenal Topeng Malangan, yang mereka tahu hanya Topeng Malangan berasal dari Malang. Melihat sejarah Topeng yang begitu panjang, wajar saja jika tidak ada pengenalan secara khusus, tentunya orang tidak akan tahu.

Selain kurang adanya sosialisasi dari pihak yang terkait, pemberian wadah bagi kebudayaan juga kurang begitu memadai di Kabupaten Malang. Terbukti dari sekian sanggar yang ada, hanya beberapa yang masih maju, yang lain sudah jarang terdengar eksistensinya. Begitu juga dengan tempat pertunjukkan atau panggung kesenian yang kurang begitu dikhususkan. DKKM (Dewan Kesenian Kabupaten Malang) saja merupakan rumah salah satu seniman yakni Bapak Henricus, yang dijadikan kantor. Selain itu menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hanya ada 3 tempat pertunjukkan yang dimiliki oleh Kabupaten Malang, yaitu :

1. Areal Stadion Kanjuruhan

Gambar 6

Halaman Samping Stadion Kanjuruhan yang biasanya digunakan untuk pertunjukan Topeng Malangan



Sumber : Dokumentasi peneliti

Gambar di atas merupakan stadion Kanjuruhan yang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang. Stadion ini merupakan stadion terbesar yang ada di Kabupaten Malang dan sering digunakan untuk pertandingan sepak bola baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Areal yang sering digunakan untuk pemetasan adalah di luar stadion dengan mendirikan panggung di sekitar areal stadion.

2. Pendopo Kabupaten

Gambar 7
Pendopo (tampak depan) yang biasa digunakan untuk pertunjukan Topeng Malangan



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas merupakan gambar pendopo yang berada di areal perkantoran Bupati Malang. Pendopo tersebut menghadap ke arah selatan, dan di selatan kantor Bupati merupakan pusat perbelanjaan, sehingga masyarakat juga dapat melihat langsung apabila ada pertunjukan. Pendopo tersebut cukup luas sehingga tidak perlu panggung lagi apabila akan mengadakan pementasan Topeng Malang.

3. Pendopo Diknas

Gambar 8
Bagian Dalam Pendopo, digunakan untuk pertunjukan Topeng Malang



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pendopo ini terletak di perkantoran Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang terletak di Kepanjen. Pendopo ini menghadap ke jalan raya dengan ukuran yang tidak terlalu luas. Selain digunakan untuk pementasan, pendopo ini juga digunakan untuk pameran-pameran yang di adakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

4. Kondisional

Pertunjukkan yang diadakan sering pula dilakukan di desa-desa atau lapangan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya jika dilakukan ditempat terbuka akan terbuka, harus mendirikan panggung terlebih dahulu.

Di luar panggung pertunjukkan yang ada di Kabupaten Malang, biasanya pertunjukkan dengan mendirikan panggung sendiri di tempat yang telah disesuaikan. Namun, untuk masalah tempat disini bukan menjadi permasalahan utama, karena di Malang raya sendiri telah

memiliki banyak Universitas yang dapat dijadikan wadah bagi mahasiswa yang ingin mempelajari kesenian. Apalagi telah ada salah satu Universitas yang memiliki jurusan seni tari, hal itu merupakan salah satu cara agar kesenian masuk di kalangan mahasiswa. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Rifqi Andi sebagai salah satu mahasiswa penikmat seni :

“Dengan adanya universitas-universitas, apalagi yang memiliki jurusan seni tari, merupakan salah satu wadah yang baik untuk melestarikan sebuah kesenian. Dengan begitu, kesenian akan masuk kampus dan pengenalan mengenai kesenian tersebut menjadi lebih mudah” (wawancara 19 Mei 2011 pukul 11.00 di kantin Universitas Brawijaya).

Sedikit penjelasan tersebut bahwa memang kampus atau lembaga pendidikan yang lain adalah wadah yang tepat untuk memperkenalkan kesenian dikalangan pelajar maupun mahasiswa. Sehingga kesenian juga dapat dipelajari oleh Universitas ternama.

Berbicara mengenai kesenian yang masuk pendidikan, sebuah kesenian juga membutuhkan seorang akademisi sebagai orang yang tahu mengenai dunia pendidikan namun juga tahu mengenai kebudayaan. kebanyakan yang sering terjadi adalah apabila kesenian tidak tersentuh oleh seorang akademisi, maka kesenian itu tidak memiliki jalan yang memang seharusnya itu dilalui oleh sebuah kesenian. Begitu juga Topeng Malangan yang harus disentuh oleh para akademisi agar kesenian tersebut dapat dilestarikan. Berikut adalah hasil wawancara dengan seorang akademisi yang diwakili oleh salah satu Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi yang juga bergelut di bidang kesenian:

“Dalam dunia seni itu perlu ada penggiatnya, dan orang yang memainkan harus tahu betul apa makna dari dia menarik Topeng Malangan tersebut”, (wawancara 30 Mei 2011 pukul 10.30 di Fakultas Ilmu Administrasi).

Beliau mengatakan bahwa kesenian itu harus ada penggiatnya, artinya orang yang benar-benar serius berusaha melestarikan Topeng Malangan. Tanpa ada penggiat seni, maka kesenian tersebut tidak akan hidup. Dan makna serta bentuk Topeng Malangan tersebut juga harus diketahui oleh penarinya maupun oleh masyarakat luas. Hal itu berkaitan dengan laku tidaknya suatu kesenian. Jika masyarakat paham mengenai makna dan bentuk Topeng Malangan, berarti secara langsung Topeng Malangan telah laku di kalangan masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Salah satu penggiat seni di Malang ini adalah Bapak Dwi Cahyono, ketua pelaksana dari Malang Tempo Dulu (MTD). Dengan adanya MTD, banyak kebudayaan (kesenian) yang ada di Malang. Selain mengadakan acara Malang Kembali, beliau juga memiliki resto yang di desain seperti museum. Jadi dalam resto tersebut sangat kental dengan suasana tradisional. Dan di dalamnya juga terpajang seluruh karakter topeng yang ada di Malang. Hal itu merupakan salah satu cara untuk melestarikan Topeng Malangan. Dalam hal pelestarian Topeng Malangan, beliau mengatakan :

“masyarakat tidak tahu bagaimana melestarikan, dan yang paling tahu cara melestarikan adalah pemerintah, mulai dari pembinaan, menginformasikan, dan masyarakat hanya tahu jadi. Tidak mungkin masyarakat tahu cara-cara melestarikan”, (wawancara di lakukan pada tanggal 21 Juni 2011 pukul 14.00 di Rumah Makan Inggil).

Beliau lebih menekankan masalah pelestarian ini kepada pemerintah karena pemerintah yang lebih banyak tahu mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam melestarikan Topeng Malang. Dan masyarakat yang kemudian akan menjalankan program dari pemerintah tersebut.

Saat ini, keberadaan Topeng Malang di Malang, telah menjadi kebanggaan tersendiri, walaupun dalam pelestariannya belum dilaksanakan secara maksimal. Seperti yang disampaikan kembali oleh salah satu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi seperti dibawah ini :

“Sejak adanya Otonomi Daerah, setiap daerah mencari icon dari daerahnya masing-masing. Dan Topeng Malang saat ini lebih maju dari sebelum adanya Otonomi Daerah, karena mau tidak mau pemerintah harus mencari icon daerah”, (wawancara 30 Mei 2011 pukul 10.30 di Fakultas Ilmu Administrasi).

Topeng Malang yang kini lebih eksis menurut beliau dikarenakan semenjak adanya Otonomi Daerah, setiap daerah menggali kemampuan daerahnya masing-masing agar muncul *icon* dari daerah tersebut. Dan usaha untuk memunculkan itu semua dengan cara mengikutsertakan Topeng Malang dengan acara-acara yang berkaitan dengan pemerintah. Dengan demikian, setidaknya telah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memunculkan kembali Topeng Malang, terlepas dari usaha tersebut telah memenuhi standar kecukupan untuk sebuah bentuk pelestarian atau tidak.

Dalam penelitian ini, swasta bukan merupakan kajian utama. Namun swasta juga merupakan bagian dari masyarakat. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menfokuskan penelitian pada pemerintah dan masyarakat. Di

lapangan, peran swasta ini nyata ada, walaupun kurang begitu dimaksimalkan oleh pemerintah. Beberapa swasta yang masih peduli dengan keberadaan Topeng Malangan ini adalah Mas Antok, salah satu pengrajin souvenir Topeng Malangan yang ada di desa Bandulan, Malang.

Beliau menyebutkan bahwa :

“saat ini masih ada beberapa instansi yang memesan Topeng Malangan dalam bentuk souvenir, seperti patung topeng mini, asbak, atau hiasan dinding. Disini ramai saat akan menyambut Malang Tempo Dulu (MTD) karena banyak instansi atau penjual yang memesan Topeng Malangan. biasanya juga ada yang memesan untuk souvenir pernikahan”, (wawancara, 2 April 2011, pukul 11.30 di rumah mas Antok).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebenarnya masih ada masyarakat (swasta), untuk mempertahankan Topeng Malangan, walaupun menurut mas Antok sendiri memang berbeda keadaannya seperti dulu. Sekarang butuh momen-momen tertentu orang (masyarakat luas) mengingat kembali tentang Topeng Malangan.

Adapula rumah makan Inggil, yang merupakan rumah makan dengan konsep museum. Pengunjung yang datang, dapat menikmati hidangan, sekaligus melihat pemandangan yang penuh dengan kebudayaan Malang, seperti aneka karakterisitis Topeng yang tertata rapi pada interior ruangan. Disana juga terdapat galeri seni yang berisikan souvenir khas Malangan, sehingga pengunjung yang makan, bisa langsung berbelanja..

Salah satu TV swasta di Malang, juga memiliki program yang khusus mengangkat kebudayaan yang ada di Malang. Namun, Topeng Malangan

belum masuk dalam kurikulum pendidikan di Malang, sehingga pengenalan sejak dini mengenai kebudayaan belum berjalan dengan baik.

Dari pihak swasta, ada salah satu penggiat seni di jalan Gajayana Kota Malang yang mendirikan sebuah galeri seni yang memang mengutamakan souvenir mengenai Topeng Malangan. Mulai dari bentuk topeng secara utuh, gantungan kunci, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Pemilik galeri ini merupakan penggiat seni yang awalnya hanya mengoleksi Topeng Malangan, namun lama-kelamaan dijadikan galeri agar masyarakat dapat mengetahui tentang Topeng Malangan. Di depan galeri tersebut juga telah tertulis bahwa disitu juga merupakan pusat informasi dari Topeng Malangan. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat Malang raya yang ingin mengetahui tentang Topeng Malangan. Pada kenyataan, menurut Ibu Titik Andayani, pemilik galeri seni, pemerintah sendiri kurang begitu memperhatikan adanya galeri ini. Menurut beliau, pemerintah tidak pernah campur tangan.

Pemerintah sendiri telah berusaha dengan cara mereka sendiri untuk melestarikan Topeng Malangan. Apapun usaha yang telah dilakukan, tetap saja pemerintah sangat berperan dalam melestarikan kebudayaan ini. Perlu adanya usaha yang lebih keras agar Topeng Malangan tetap menjadi kebanggaan.

c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

Dalam sebuah kerjasama tentunya akan menghasilkan suatu kemitraan agar tujuan yang diharapkan dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini yang mengangkat mengenai pemerintah dan masyarakat yang memiliki tujuan dan harapan yang masing-masing belum tercapai dengan baik. Pemerintah dalam hal pelestarian kesenian Topeng Malang telah berusaha dengan cara pemerintah sendiri dengan memberikan pelatihan-pelatihan, seperti mengirim para seniman dalam acara kesenian yang ada di propinsi maupun nasional. Dan dari masyarakat itu sendiri yang terdiri dari rakyat biasa dan para seniman, mengharapkan pemerintah lebih serius menangani masalah-masalah kebudayaan yang saat ini memang sedang tidak memiliki banyak peminat. Masyarakat akan mengkonsumsi hal-hal yang dianggap cocok bagi mereka saat itu. Belum ada suatu program atau minimal proyek yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya pelestarian ini. Harapan dari masyarakat adalah pemerintah lebih perhatian, misalnya dengan memberi dana yang tidak dipersulit, memberi pembinaan terhadap masyarakat luas bukan seniman saja, atau peraturan yang tertulis agar Topeng Malang ini juga tetap memiliki kekuatan untuk bertahan dalam era modernisasi yang pesat. Sehingga dari kedua pihak ini, pemerintah dan masyarakat, belum terjadi kesamaan visi.

Kerjasama yang masih sering terjalin biasanya pada saat pemerintah mempunyai acara, dan tari Topeng Malang sebagai bagian dari acara tersebut. Seperti yang terjadi pada saat perayaan Malang Kembali atau yang lebih populer dengan nama Malang Tempo Dulu (MTD), seperti pada gambar berikut :

Gambar 9
Pementasan Topeng Malang di acara Malang Tempo Dulu (MTD)



Sumber : Dokumentasi sanggar Asmorobangun, 2011

Memang hampir setiap tahun Topeng Malang ada dalam perayaan MTD. Dan itulah salah satu bentuk nyata kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat.

Pendapat salah satu akademisi, menganggap bahwa memang saat ini Topeng Malang sudah lebih maju dibanding sebelum ada Otoda. Usaha pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah telah ada, namun memang

belum diketahui usaha tersebut berhasil atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, yaitu :

“Ada usaha yang dilakukan yang oleh pemerintah, namun itu sudah masuk dalam masyarakat apa belum, itulah yang saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Dan apakah masyarakat juga respon dengan usaha tersebut atau tidak. Kalau tidak direspon, berarti Topeng Malangan hanya akan pentas di acara-acara pemerintah. Dan usaha-usaha tersebut masih pada tahap serius untuk acara pemerintah, bukan acara masyarakat”. (wawancara 30 Mei 2011 pukul 10.30 di Fakultas Ilmu Administrasi).

Beliau menjelaskan bahwa masyarakat itu tidak bisa dituntut. Dan masyarakat akan menggunakan hal-hal tertentu yang sesuai dengan masanya. Saat ini tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana mengangkat kembali Topeng Malangan yang sesuai dengan nuansa kebatinan masyarakat. Dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi senang menikmati Topeng Malangan yang sesuai dengan selera masyarakat saat ini.

Banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pelestarian Topeng Malangan ini. Bukan hanya pemerintah saja yang berusaha, seluruh masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun seniman juga harus mempunyai usaha keras dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

Pihak swasta sendiri kebanyakan menganggap bahwa kesenian tradisional saat ini kurang begitu menjual. Terbukti dengan event-event yang ada di Malang adalah kebanyakan event anak muda. Pernah ada pertunjukan kesenian, namun yang datang tentunya dari meraka telah mengenal kebudayaan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan salah satu

pernyataan dari salah satu pengelola *Event Organizer (EO)* di Malang, Chairul Arifin, yang mengatakan bahwa :

“Memang dari manajemen kita jarang sekali mengadakan acara yang berkaitan dengan kesenian, selain peminatnya sedikit, sekarang juga sulit ditemui anak muda yang paham dengan kesenian. Karena memang target acara kita adalah anak muda, tidak mungkin mengajak yang tua-tua untuk berpartisipasi. Kecuali acara tersebut di adakan oleh instansi, seperti HUT kota Malang kemarin, yang menampilkan sedikit unsur Topeng Malangan kontemporer bukan yang pyur tradisi”, (wawancara, 20 Juni 2011 pukul 17.00 di rumah mas Chairul Arifin).

Dari pernyataan di atas, jelas adanya bahwa swasta sendiri kurang begitu tertarik karena masyarakatnya tidak mengindikasikan kesukaan mereka terhadap kesenian. Hal inilah yang saat ini perlu dikaji lebih dalam bagaimana menjalankan sektor-sektor ini agar menjadi kesatuan yang baik guna pelestarian kebudayaan, khususnya Topeng Malangan.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

Dalam upaya pelestarian kesenian Topeng Malangan ini, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya sendiri telah bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Dan dalam perjalanan menjalin hubungan yang baik ini tentunya ada pendukung dan juga penghambat.

- a. Faktor pendukung

Sinergi ini harus mendapat dukungan yang baik, jika dukungan sudah tidak ada dari masing-masing pihak yang bekerja sama, maka sinergi

tidak akan terjalin pula. Demikian pula dalam melestarikan kebudayaan yang merupakan masalah yang kompleks, dan bukan hanya satu pihak yang bertanggung jawab. Faktor pendukung dari sinergi pemerintah dan masyarakat dalam melstarikan kesenian Topeng Malang antara lain adalah :

- 1) Adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008, yang menyatakan mengenai tugas dan fungsi serta kewajiban pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang menangani langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian budaya.
- 2) Adanya hubungan saling membutuhkan dalam sebuah acara. Seperti misalnya dari pihak pemerintah mengadakan sebuah acara, lalu para seniman Topeng Malang sebagai pengisi acara dalam cara tersebut. Dan menurut ibu Dyah sebagai Kabid Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, menyatakan bahwa pemerintah propinsi sering mengadakan acara-acara kesenian sebagai wadah perkumpulan seniman di Jawa Timur. Hal tersebut sekaligus akan membawa nama kesenian Malang.

b. Faktor penghambat

Permasalahan yang terjadi dalam peletarian memang banyak. Baik dari pihak masyarakatnya sendiri maupun dari pihak pemerintah. Masing-

masing merasa sudah bertindak dalam upaya pelestarian Topeng Malangan. Dan yang menjadi faktor penghambat dalam sinergi antar keduanya antara lain :

- 1) Komunikasi dari masing-masing pihak berjalan kurang baik sehingga sering terjadi salah persepsi dalam mengatasi suatu masalah.
- 2) Dukungan berupa dana dari pemerintah yang masih minim sehingga membuat para seniman berjuang sendiri mencari dana. Padahal dari pihak masyarakat dan seniman ini menganggap bahwa kesenian Topeng Malangan ini adalah aset, sehingga pantas untuk mendapat perhatian yang lebih. Dan dari pihak pemerintah merasa bahwa ada banyak urusan lain yang selain pelestarian Topeng Malangan yang harus mendapat perhatian juga. Menurut ibu Dyah, Kabid Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, *'apalagi mengingat bahwa Kabupaten Malang memiliki kawasan yang luas, sehingga masalah dana tidak bisa dengan mudah dapat dibagi rata'*. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah masih kekurangan dana juga dalam mengurus urusan pemerintahan karena luas daerah, apalagi untuk menangani bidang kebudayaan, masih sulit.
- 3) Masyarakat Malang memang tahu mengenai Topeng Malangan, tapi hanya sedikit yang mengenal secara mendalam tentang kebudayaan ini. Masyarakat di sekitar sanggar adalah masyarakat yang sedikit lebih memahami tentang Topeng Malangan karena memang sanggar letaknya dekat dengan masyarakat sekitar. Namun masyarakat lain

belum tentu paham benar mengenai pentingnya kesenian ini untuk terus dijaga. Inilah yang menjadi permasalahan di masyarakat. Kesenian belum begitu melekat dalam kehidupan mereka.

- 4) Program-program khusus dari pemerintah, terlebih yang kontinyu, yang berkaitan dengan pelestarian Topeng Malang masih belum ada. Sehingga masyarakat yang tidak tahu akan semakin tidak mengenal Topeng Malang dan menjadikan tidak adanya wadah hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- 5) Pengetahuan tentang Topeng Malang yang tidak diajarkan sejak dini dalam dunia pendidikan (belum masuk dalam kurikulum).
- 6) Masyarakat swasta, berkaitan dengan perannya dalam bidang pariwisata, kurang begitu dimaksimalkan dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

D. Analisis

1. Sinergi antara Pemerintah dan masyarakat.
 - a. Peran pemerintah.

Seperti yang telah dijelaskan oleh World Bank (dalam LAN, 2000:5) diawal bahwa *governance is the way state power is used in managing economic and social resources for development of society* (cara menggunakan kekuasaan Negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi dan sosial untuk pembangunan). Dari segi sumber-sumber ekonomi tentunya sudah pasti dilakukan, karena berkaitan dengan belanja negara. Namun dari segi sosial salah satunya dilakukan dengan

melestarikan kebudayaan yang telah ada. Dan kesenian Topeng Malangan merupakan salah satu kebudayaan yang harus tetap dilestarikan. Kenyataan yang terjadi dalam pelestarian Topeng Malangan, pemerintah belum benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada. Di Malang, banyak sekali terdapat seniman, namun seringkali terjadi bahwa para seniman selalu berjuang sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah.

Dalam prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), hubungan ketiga sektor sangat dibutuhkan baik segi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam hal berkesenian di Malang, pihak swasta jarang sekali turut andil dalam upaya pelestarian karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa acara-acara yang berkaitan dengan kesenian sudah jarang peminatnya. Sehingga pihak swasta juga jarang menyentuh kesenian. Hanya beberapa orang yang masih bertahan dengan galeri-galeri seni yang berisikan Topeng Malangan. Oleh karena itu peneliti lebih menfokuskan pada hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat saja dengan tidak mengenyampingkan sektor swasta sebagai salah satu unsur *Governance*.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat disini belum berjalan dengan baik. Karena pemerintah seringkali merasa telah melakukan usaha pelestarian sedangkan saat di *floor*-kan dimasyakat juga mereka merasa belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam prinsip *Good Governance* juga kerjasama yang dilakukan dapat dilakukan dengan pihak lain, seperti yang disebutkan dalam penelitian ini adalah Dewan Kesenian

Kabupaten Malang (DKKM). Hal ini juga telah sesuai dengan Tugas pokok dari Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kesenian, pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi yang terkait. Dewan kesenian berfungsi menjembatani antara masyarakat seniman dan pemerintah. Dan masalah yang selama ini terjadi juga, DKKM berjalan sendiri dan pemerintah berjalan sendiri sehingga jarang sekali menemukan satu pemikiran yang baik dalam upaya pelestarian Topeng Malangan.

Selain prinsip *Good Governance* secara umum diatas, beberapa prinsip yang lebih spesifik dari perwujudan *Good Governance* yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan salah satunya adalah memiliki wawasan ke depan, artinya pemerintah harus memiliki strategi-strategi yang harus dijalankan de depan. Strategi ini belum dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang. Karena kebijakan, dalam dal ini peraturan Daerah yang berkaitan dengan kesenian baru dalam tahap penyusunan tahun ini. Namun rencana kerja seperti program kerja jangka pendek walaupun pemerintah sendiri kurang begitu terbuka dengan program-program yang akan dijalankan. Selain belum memiliki visi ke depan, tranparansi juga kurang. Terbukti saat peneliti mencoba menanyakan masalah anggaran dana untuk kebudayaan, pihak dinas kurang terbuka dengan alasan hal itu merupakan rahasia.

Berkaitan dengan tugas pokok pemerintah mengenai pemberian bantuan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kesenian, pemerintah telah berusaha mewujudkan. Terbukti dengan pendanaan pada pentas rutin yang ada di stadion Kanjuruhan setiap malam minggu. Namun tetap saja, pemerintah belum terbuka mengenai anggaran yang diberikan tersebut.

Prinsip berikutnya adalah partisipasi. Partisipasi disini tentunya bukan dari salah satu sektor saja tetapi seluruh sektor harus mampu berpartisipasi dalam pelestarian kesenian Topeng Malang. Secara partisipatif baik dari pemerintah maupun masyarakat telah melaksanakan tugas mereka masing walaupun kurang begitu maksimal. Pemerintah berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok yang telah ditentukan, yaitu salah satunya memberikan pembinaan kesenian kepada sanggar-sanggar yang ada. Bentuk partisipasi dari masyarakat adalah dengan tetap mempertahankan kesenian Topeng Malang walaupun dengan keadaan yang seadanya.

Prinsip selanjutnya berkaitan dengan tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pelestarian kebudayaan. pemerintah dituntut untuk mampu mengayomi dan memfasilitasi segala kegiatan berkaitan dengan pelestarian kesenian. Pemerintah disini yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang nampaknya belum sepenuhnya menunjukkan bentuk tanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelestarian kesenian daerah. Terbukti dengan banyaknya sanggar-sanggar kesenian yang hampir mati karena tak bisa lagi melakukan kegiatan berkesenian. Padahal tempat

sudah ada, hanya tinggal bagaimana memanfaatkan tempat yang ada. Hal ini menurut banyak seniman, butuh sedikit sentuhan dari pemerintah agar semua juga berjalan dengan baik. Berkaitan dengan tugas pokok dari pemerintah tentang prinsip tanggung jawab, telah dilaksanakan. Yakni dengan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas yang di adakan tiap satu bulan sekali.

Pemerintah yang responsif sangat dibutuhkan dalam upaya pelestarian ini. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelestarian kebudayaan akan menyangkut banyak faktor dan banyak aktor, sehingga jika pemerintah tidak tanggap dengan permasalahan yang ada, maka permasalahan yang terjadi akan semakin rumit. Sebagai contoh di Indonesia, dulunya tak ada yang peduli dengan kesenian reog maupun angklung, baru setelah diklaim oleh Malaysia, pemerintah cepat-cepat bertindak. Hal ini dirasa kurang efektif. Di Kabupaten Malang, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat banyak sanggar tari, jika pemerintah responsif maka pemerintah akan memberdayakan sanggar yang ada sebagai salah satu upaya melestarikan kebudayaan, khususnya kesenian Topeng Malang.

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada banyak pihak swasta yang sebenarnya banyak berperan dalam pelestarian Topeng Malang. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, ada galeri seni yang menjual khusus souvenir Topeng Malang, adapula pengrajinnya. Namun pemerintah kurang responsif terhadap keberadaan mereka.

Bukan hanya harus responsif, pemerintah juga harus profesional dan kompetitif dalam menangani masalah kesenian ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagaimana cara pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pelestarian kebudayaan. selama ini yang terjadi, swasta belum mendapat tugas khusus dari pemerintah untuk melestarikan kebudayaan.

Dan tidak adanya peraturan daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten membuat tugas dari dinas tersebut hanya mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Malang. Seharusnya peraturan daerah merupakan landasan yang penting. Walaupun saat ini belum ada peraturan daerah dan masih dalam tahap penyusunan, setidaknya itu merupakan usaha pemerintah Kabupaten Malang.

b. Peran masyarakat.

Pengertian dari kebudayaan menurut Edward Bunnet Taylor (dalam Susanto, 2005:184) adalah kumpulan dari semua kemampuan dan kebiasaan yang diperlukan seorang manusia sebagai anggota dari masyarakat. Begitu juga dengan kesenian Topeng Malang yang berkembang saat ini di masyarakat Malang, merupakan hasil dari kebiasaan yang telah dilakukan sejak jaman kerajaan Majapahit. Dahulunya pertunjukkan Topeng ini dilakukan saat ada acara besar di kerajaan, dan hasil dari kebiasaan tersebut, sampai saat ini seiring dengan berkembang waktu, topeng ini bertahan dengan segala

perkembangannya sesuai masa kekinian. Dan itulah yang disebut bahwa kebudayaan lahir dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah di daerah Kedungmonggo, masyarakatnya lebih ada rasa memiliki dibanding masyarakat di daerah lain, terlebih masyarakat Malang secara luas. Di kedungmonggo sering diadakan acara gebyar Topeng Malangan yang diadakan setiap satu bulan sekali, dan ini telah berlangsung sejak lama. Jika di sanggar-sanggar lain memiliki kebiasaan seperti ini, maka secara otomatis masyarakat disekitarnya akan terbiasa dan ikut menjaga kelangsungan hidup sebuah kesenian. Keberadaan sanggar lain seperti Setyo Utomo, Mangundharmo, juga masih berkegiatan walaupun tidak sesering di Asmorobangun.

Kebudayaan daerah adalah kebudayaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tertentu. Begitu juga dengan kesenian Topeng Malangan ini yang memang berkembang asli dari Malang. Walaupun persebarannya ada diseluruh Malang raya, tetap saja saat ini Topeng Malangan telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Malang secara keseluruhan. Dan kesenian daerah ini muncul saat penduduk suatu daerah, seperti halnya di Malang, telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga itu menjadi suatu kebiasaan yang membedakan masyarakat Malang dengan penduduk-penduduk yang lain. Budaya daerah seperti ini juga berkembang di

Indonesia pada zaman kerajaan-kerajaan terdahulu sampai saat ini menyebar diseluruh nusantara.

Fungsi kebudayaan (Maryaeni, 2005:91) yang dikembangkan oleh masyarakat pendukungnya itu merupakan alat penyambung non-jasmaniah yang mempermudah upaya manusia memenuhi kebutuhan pokok maupun dalam usaha memahami lingkungan dimana mereka merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Salah satu sanggar yang menjadi situs penelitian, yaitu sanggar Asmorobangun, memiliki masyarakat yang sangat mendukung kebudayaan yang ada. Demikian pula yang dijelaskan oleh bapak Suroso, pemilik sanggar seni Asmorobangun, bahwa kebudayaan itu akan bertahan jika masyarakat disekitarnya mendukung adanya kebudayaan tersebut. Jika lingkungan tidak mendukung, maka kebudayaan itu akan hidup sendiri tanpa ada aktor pendukungnya. Lama-lama kebudayaan tersebut akan berlalu sebagai sejarah dan masyarakatnya juga berubah seiring modernisasi. Dan kesenian Topeng Malangan adalah kebudayaan yang harus tetap dijaga.

c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

Kemitraan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah kerjasama dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Kemitraan yang dilakukan dalam rangka melestraikan kebudayaan khususnya kesenian Topeng Malangan, dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak ini harus

bekerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan prinsip kemitraan menurut Adi Candra Utama (2006 : 51) yaitu :

(5) Saling Percaya dan Menghormati

Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Begitu juga dalam melestarikan Topeng Malangan, pihak yang harus saling percaya dan menghormati adalah pemerintah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan masyarakat yakni praktisi Topeng Malangan. Mengingat posisi dan peran masing-masing yang sangat penting, sehingga sampai kepada kondisi yang paling tinggi, yaitu saling percaya dan penghormatan satu sama lain. Dalam hal ini, nampaknya baik pihak Dinas maupun seniman, tingkat kepercayaannya belum pada titik tertinggi. Namun jika saling menghargai, kedua telah saling menghargai.

(6) Otonomi dan Kedaulatan

Salah satu komponen penting yang menjadi penyusun bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan atas otonomi kelembagaan. Prinsip ini telah dilakukan, terbukti dengan adanya Dinas yang telah bekerja sesuai dengan kapasitasnya, walaupun kurang dijalankan dengan maksimal. Dan masyarakat, dalam hal ini seniman dan masyarakat secara umum juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya sebagai masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam

pelestarian Topeng Malangan adalah pihak pemerintah maupun masyarakat telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing, namun belum maksimal.

(7) Saling Mengisi

Saling mengisi berarti juga menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan adalah hal yang paling penting apabila menjalin hubungan dengan siapapun. Begitu juga dengan pemerintah dan masyarakat yang tetap saling menghargai satu sama lain walaupun pernah terjadi kekecewaan dari salah satu pihak. Pemerintah walaupun tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetap pemerintah menghargai masyarakat sebagai pewaris dari kebudayaan. Begitu juga dengan masyarakat, masyarakat tetap menghargai dan memaklumi pekerjaan pemerintah yang tidak hanya mengurus masalah kesenian topeng ini.

(8) Keterbukaan dan Pertanggungjawaban

Meskipun kemitraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya bukan berarti pihak-pihak yang terlibat di dalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang dijalankannya. Dari pihak masyarakat maupun pemerintah masih kurang terbuka dengan kepentingan masing-masing. Sehingga dua pihak ini jarang menjalin kerjasama. Adapun yang sering dilakukan adalah kerjasama yang menyangkut masalah kedinasan seperti pengiriman seniman atau acara dari pemerintah Kabupaten. Kurang seringnya

interaksi, membuat hubungan keduanya menjadi tidak terlalu dekat, sehingga kesediaan untuk berbagi masih dirasa kurang. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud dan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggung jawaban terhadap semua pelaksanaannya pada tataran praksis. Berjalannya kedua prinsip tersebut di atas akan menjadikan kemitraan menjadi sebuah pilihan rasional dalam menjalankan relasi kelembagaan yang sehat dan positif. Tanggung jawab pemerintah selama ini dirasa kurang karena dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertera pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008, tidak semua dijalankan. Dan peraturan daerah juga belum dibuat. Hal ini membuat kebijakan belum ada, lalu berdampak pada program yang kurang maksimal pula.

Pemerintah tentunya berkewajiban untuk memfasilitasi segala kebutuhan untuk pelestarian budaya, sedangkan masyarakatnya berfungsi sebagai pemegang kebudayaan untuk terus dilestarikan turun temurun. Di Kabupaten Malang, kerjasama seperti ini telah dilakukan walaupun kurang berjalan begitu baik.

Kemitraan menuntut para aktornya untuk memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. Gunanya agar kemitraan yang terjadi bisa lebih mudah untuk dijalankan. Jika tujuannya berbeda, maka pihak yang bermitra akan berjalan sendiri-sendiri. Dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan, baik masyarakat maupun pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni melestarikan budaya, khususnya Topeng Malangan. Namun yang terjadi

selama ini adalah cara sudut pandang dari masing-masing pihak berbeda. Masing-masing pihak merasa telah melakukan upaya untuk melestarikan Topeng Malangan.

Dalam menjalin kemitraan pastinya harus ada kesepakatan. Tentunya hal ini dilakukan jika kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama bisnis sehingga harus ada MoU (*Moment of Understanding*). Dan dalam melestarikan Topeng Malangan, tidak perlu suatu kesepakatan yang tertulis, cukup suatu bentuk kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya agar tidak sampai punah.

Pihak yang bermitra pastinya karena ada rasa saling membutuhkan. Pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan juga saling membutuhkan. Pemerintah tak bisa berjalan sendiri tanpa ada masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dengan kebudayaan. begitu juga dengan masyarakat yang tidak begitu saja mampu menjaga sebuah kebudayaan jika kebudayaan tersebut tidak diakui oleh pemerintah. Pemerintah akan memfasilitasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan budaya lokal yang ada.

Model kemitraan dalam melestarikan Topeng Malangan adalah kemitraan mutualistik yang merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara optimal, yaitu melestarikan Topeng Malangan. hal

ini sesuai yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004:129). Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua pihak yang bermitra.

c. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan.

a. **Faktor pendukung**

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2008

Adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008, tentunya sangat menguntungkan sebagai pedoman pelaksanaan pelestarian kebudayaan, dalam hal ini Topeng Malangan. Peraturan Bupati tersebut juga sebagai pengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, agar tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing yang berkaitan dengan kebudayaan. Tanpa adanya Peraturan Bupati ini, maka pemerintah dapat bertindak semena-sema dalam mengurus kebudayaan di Kabupaten Malang.

2. Acara Tingkat Propinsi

Pihak pemerintah sering mengadakan acara baik tingkat lokal maupun propinsi. Dengan adanya Topeng Malangan yang memang sebuah pertunjukkan asli Malang, merupakan sebuah bentuk promosi bagi pariwisata di Malang. Seperti di Bali, masyarakat dan pemerintahnya begitu solid dalam melestarikan budaya, sehingga untuk penyambutan tamu, diadakan pertunjukkan tari dan sebagainya. Kabupaten Malang

sedikit demi sedikit telah melakukan promosi tersebut walaupun belum berjalan dengan sempurna.

b. Faktor penghambat

a. Komunikasi

Kurang adanya komunikasi dari masing-masing pihak dikarenakan masing-masing memiliki kepentingan sendiri yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Pemerintah merasa dengan telah mengirimkan seniman di acara-acara propinsi, itu merupakan suatu bentuk pembinaan, dan dari pihak seniman masyarakatnya, merasa kurang jika pembinaan hanya dilakukan hal seperti itu. Keinginan masyarakat adalah bantuan secara moril maupun materiil terhadap kebudayaan yang ada, misalnya memberdayakan kembali sanggar-sanggar yang telah ada. Pemberian dana terhadap acara-acara yang berkaitan dengan pementasan Topeng Malang, dan pengakuan yang sah atas kebudayaan ini. Begitu juga pihak swasta yang merasa kurang ada dukungan dari pemerintah sehingga swasta juga berjuang sendiri.

b. Pendanaan

Kecilnya dukungan berupa dana dari pemerintah yang akhirnya membuat para seniman berjuang sendiri mencari dana. Dana tersebut biasanya diperoleh dari seniman-seniman yang lebih besar seperti di Yogyakarta dan Surabaya. Memang jika membicarakan dana adalah masang sensitif bagi siapa saja. Pemerintah sendiri mengatakan bahwa wilayah di Kabupaten Malang ini sangat luas, sehingga tidak

gampang begitu saja dikeluarkan untuk urusan kebudayaan. pemerintah sendiri mengeluhkan pendapa asli daerah yang dirasa kurang cukup.

c. Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran dari masyarakat ini adalah masalah yang terbesar yang dihadapi berkaitan dengan kebudayaan. Melihat saat ini juga kebudayaan menjadi sesuatu yang tidak berharga jika dibanding dengan kecanggihan teknologi dan permainan-permainan yang lebih menarik bagi generasi muda, seperti banyaknya jejaring sosial yang muncul dan tren-tren kehidupan barat yang telah mempengaruhi generasi penerus. Disinilah peran pemerintah berguna untuk “memaksa” generasi muda setidaknya untuk mengetahui kebudayaan yang ada disekitar mereka. Bentuk promosi, dan pengenalan sejak dini sangat dibutuhkan agar kebudayaan akhirnya dikenal masyarakatnya sendiri.

d. Program

Tidak ada program-program khusus dari pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian Topeng Malang. Dalam membuat program memang bukan perkara yang mudah. Ada atau tidak adanya program ini sangat erat kaitannya dengan SDM (Sumber Daya Manusia). Setiap program nantinya harus dimatangkan dulu dari segi teknis dan pelaksanaannya, dan inilah yang belum ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Dengan ada program-program maka

akan ada interaksi, dengan interaksi tersebut maka komunikasi juga akan berjalan dengan baik.

e. Pendidikan Sejak Dini tentang Kesenian

Pengetahuan tentang Topeng Malang yang tidak diajarkan sejak dini dalam dunia pendidikan (belum masuk dalam kurikulum).

Sehingga yang belajar tentang kesenian hanyalah mereka yang ingin belajar. Jadi bukan merupakan pendidikan pokok yang harus diajarkan sejak. Hal ini membuat kesenian hanya terbatas pada beberapa orang saja. Kesenian seperti ini harus “dipaksa” masuk dalam pendidikan agar sejak dini masyarakat telah mengetahui kesenian, minimal kesenian yang ada di daerah masing-masing.

f. Swasta kurang maksimal

Masyarakat swasta perannya kurang begitu dimaksimalkan dalam melestarikan kesenian Topeng Malang. Padahal jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Swasta dapat berperan dalam promosi pariwisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengenai sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka melestarikan kesenian Topeng Malang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sinergi antara Pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malang, dapat dilihat dari :

a. Peran pemerintah dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

Peran pemerintah yang harusnya mampu memfasilitasi dan juga manajemen agar kesenian Topeng Malang tidak hilang juga masih sangat minim peran. Pemerintah lebih cenderung pada pelaksanaan dan pengakuan secara administratif saja, bentuk kerja nyata di lapangan nampaknya masih belum ada. Perhatian atas kebutuhan masyarakat secara umum mengenai pelestarian Topeng Malang, juga kurang terpenuhi dengan baik.

b. Peran masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

Peran masyarakat juga kurang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Dari pihak swasta, kontribusi yang diberikan belum maksimal. Karena pihak pemerintah juga kurang memanfaatkan keberadaan swasta untuk melestarikan kesenian Topeng Malang. Selama ini, masyarakat dari kalangan seniman yang masih berusaha bertahan dengan keadaan yang

ada. Dan masyarakat secara umum justru banyak yang tidak peduli dengan kebudayaan yang ada. Hanya masyarakat yang ada disekitar sanggar tari yang masih dapat diharapkan dalam rangka pelestarian Topeng Malang karena mereka dirasa lebih dekat.

- c. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malang.

Sinergi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat kurang berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat sendiri yang sama-sama bertahan keadaan masing-masing, karena mereka merasa dengan bekerja sama nantinya justru menjadikan masalah terlalu rumit. Walaupun sebenarnya dua pihak ini mempunyai tujuan yang sama, yakni mempertahankan kesenian Topeng Malang yang ada.

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Topeng Malang, ditinjau dari :

- a. Faktor pendukung :

- 1) Adanya Peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008, mengenai tugas dan fungsi serta kewajiban pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang menangani langsung masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Dan merupakan salah satu pedoman untuk melestarikan kebudayaan, khususnya kesenian Topeng Malang.

2) Adanya hubungan saling membutuhkan dalam setiap acara yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri maupun dari pemerintah Kabupaten Malang.

b. Faktor penghambat :

1) Komunikasi yang terjalin antara kedua pihak kurang berjalan dengan baik (pemerintah dan masyarakat).

2) Dukungan dari pemerintah baik secara moril maupun materiil yang masih kurang.

3) Masyarakat Malang secara umum kurang mengenal lebih dekat dengan kesenian Topeng Malangan, sehingga *sense of belonging* juga menjadi tidak ada.

4) Tidak adanya program-program khusus dari pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian Topeng Malangan.

5) Pengetahuan tentang kesenian Topeng Malangan kurang ditanamkan sejak dini.

6) Peran swasta kurang dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya melestarikan kesenian Topeng Malangan.

3. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa kesenian Topeng Malangan merupakan sebuah pertunjukkan topeng istana yang saat ini telah menjadi pertunjukkan rakyat. Sedangkan pertunjukkan topeng yang berkembang di Malang merupakan sebuah pertunjukkan seni yang khas, berbentuk drama yang ditampilkan oleh penari yang mengenakan topeng dengan tujuan yang lebih esensial dan simbolik dan

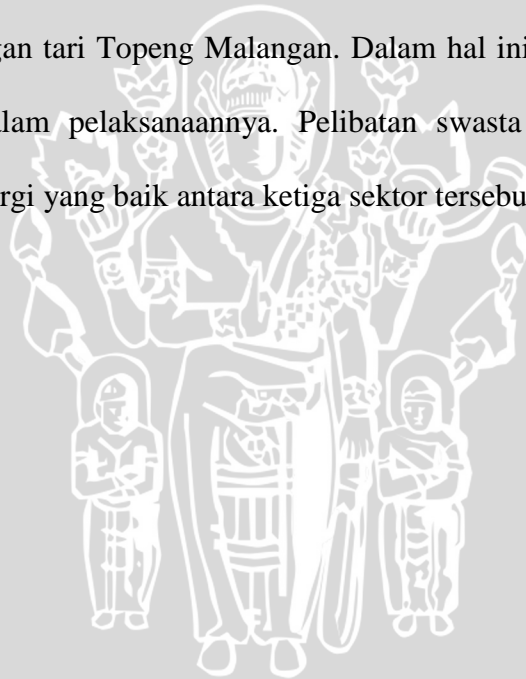
terdapat dalang sebagai pemimpin pertunjukan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008, belum semua telah dijalankan dengan baik. Beberapa tugas yang telah dilaksanakan antara lain pembinaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu prinsip *Good Governance* adalah kemitraan yang terjalin antara *state, civil society, and private*. Dan saat ini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan Topeng Malangan masih sangat kurang. Hal ini berdampak buruk pada Topeng Malangan yang saat ini tak lagi jadi Primadona di Malang. Oleh karena kesenian ini begitu berharga dan merupakan warisan leluhur, maka kesenian ini wajib dilestarikan dan itu merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, segala hambatan yang mempengaruhi sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus diselesaikan secara bersama-sama sesuai peran masing-masing.

B. Rekomendasi

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat agar sinergi yang terjalin dalam melestarikan kesenian Topeng Malangan tetap terjalin dengan baik. Berbagai usaha yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang baik pula. Sedangkan dari peneliti sendiri memiliki saran-saran yang diharapkan mampu membantu sinergi ini agar tetap berjalan, diantaranya adalah :

1. Pemerintah dan masyarakat harus terus mengadakan komunikasi, baik secara formal maupun non-formal. Komunikasi secara formal misalnya dilakukan dengan sarahasehan budaya dengan menghadirkan seniman-seniman Malang dan juga masyarakat untuk lebih mengenal salah satu budaya. Komunikasi non-formal dapat dilakukan dengan pemerintah apabila masyarakat seniman maupun masyarakat umum memiliki suatu kendala tertentu. Dengan demikian, komunikasi akan terus berjalaml, dengan jalannya komunikasi maka hubungan kerjasama keduanya akan semakin baik pula.
2. Pemerintah harus memiliki tanggung jawab dan lebih responsif menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merubah sistem yang selama ini kurang tepat dilaksanakan dalam pelestarian Topeng Malangan.
3. Pemerintah mengadakan program atau kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian budaya. Selama ini belum ada program yang secara khusus diadakan untuk kebudayaan. Seperti mengadakan pertunjukan Topeng Malangan secara kontinyu di suatu tempat, sehingga memudahkan wisatawan untuk mengenal lebih dekat kebudayaan Malang.
4. Memasukkan kesenian Topeng Malangan dalam kurikulum pendidikan agar pengetahuan mengenai kesenian telah ditanamkan pada anak didik sejak dini. Sehingga Topeng Malangan secara otomatis akan menyentuh setiap orang yang menempuh pendidikan.

5. Pelaksanaan *Good Governance* selalu melibatkan tiga sektor di dalamnya, yaitu *State, Private, and Civil Society*. Berkaitan dengan penelitian ini, pemerintah perlu mendorong pihak swasta untuk terlibat dalam *Governance*. Salah satunya dengan ikut melestarikan kebudayaan (kesenian) daerah. Seperti memasukkan Topeng Malangan pada pihak-pihak swasta seperti Travel Agen, sehingga dapat direkomendasikan pada wisatawan. Kemudian direkomendasikan untuk masuk di tempat rekreasi atau hotel-hotel, sehingga apabila ada wisatawan yang datang dapat disambut dengan tari Topeng Malangan. Dalam hal ini, pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaannya. Pelibatan swasta akan mendorong terjadinya sinergi yang baik antara ketiga sektor tersebut.



Daftar Pustaka

- Arifin, Imron. 1994. *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang : Kalimasahada Press.
- Arini, Sri Hermawati Dwi, dkk.2008. *Seni Budaya*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Candra, Utama Adi. 2006. *LSM vs LAZ*. Depok : Piramedia.
- Harrison, Lawrence E dan Samuel P.Huntington. 2006. *Kebangkitan Peran Budaya*. Jakarta : LP3ES.
- Hidayat, Robby.2008.*Wayang Topeng Malangan*. Malang : Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
- Islami, Irfan.2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, cet. ke-20. Jakarta :PT Gramedia Pustaka Tama.
- Krina, Loina L. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta : BAPENAS.
- Kushandajani. 2001. *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Teguh Yuwono (ed). Semarang : CLOGAPPS.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas Kinerja dan Good Governance*. Jakarta.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzuki. 2005. *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung : Yarma Widya.
- Murgiyanto, Sal. M. dan Munardi, A.M. 1979/1980. *Topeng Malang*. Proyek sasarana budaya direktorat jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Jakarta
- Permas, Achsan. 2003. *Manajemen Organisasi Seni Pertunjukkan*. Jakarta : Penerbit PPM
- Rewansyah, Asmawi.2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta : CV. Yusaintanas Prima.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Santana K, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta : Kencana.
- Siagian, Sondang. 1973. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Haji Masagung.
- Sibarani, Robert.2003. *Identitas Budaya dalam Kemajemukan Bangsa*, Poestaka, Jurnal ilmu-ilmu Budaya, No.6 tahun XIV, Agustus.
- Soelaeman, Munandar. 2007. *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama.
- Soeroto, Myrtha. 2007. *Reformasi Kebudayaan : Upaya Menemukan Kembali Jati Diri Bangsa*. Depok : Myrtle Publishing bekerja sama dengan Yayasan Enam Enam.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : PT. Alfabeta

- Sulistiyani, AT. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Jogjakarta : Gava Media.
- Supriyanto, Henri dan Adi Pramono, M., Soleh. 1997. *Drama Tari Wayang Topeng Malang*. Malang : Padepokan seni Mangun Dharma
- Susanto, Harry. 2005. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember : Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta : Kanisius.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.
- Utomo, Paring Waluyo. 2004. *Topeng Malangan : Simbol Pertarungan Berbagai Identitas., Ngaji Budaya*. Edisi ke-10 Februari 2004
- Widyosiswoyo, Supartono. 2008. *Ilmu Budaya Dasar*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Jurnal

- Daniels, Brian I. 2010. *Culture, Cultural Rights, and the Right to Assemble Anthropological Quarterly*, Vol. 83, No. 4, pp. 883–896
- Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2010. *Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 Bidang Kebudayaan*
- Eelke De Jong, Roger Smeets And Jeroen Smits. 2006. *Culture And Openness*. 78: 111–136
- Roginsky, Sandrine. 2009. *Journal of Sociology and Social Policy*. Vol. 29 Nos. 9/10
- Sartini. 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*. Jilid 37, Nomor 2

Internet

- Arifninetrirosa. 2005. Pemeliharaan Kehidupan Budaya Kesenian Tradisional dalam Pembangunan Nasional. Melalui <http://www.e-USU.com/repository/etnomusikologi-arif.pdf> (diakses pada tanggal 15 November 2010)
- Gunawan, Anggun. 2007. Fenomena Konsep kebudayaan Indonesia. Melalui <http://www.WordPress.com/kebudayaan%press-konsep-kebudayaan-indonesia.html> (diakses pada 15 November 2010).
- <http://kazeyagami.blog.friendster.com/2009/02/hanami/> (diakses pada 28 januari 2011).

Artikel

- Zaini Rohmad dan Sudarmo. 2009. *Artikel Kebijakan Kemitraan Publik, Privat Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata*.

Suasana Festifal Kesenian Kawasan Selatan



Suasana Pembinaan Kesenian di Kepanjen



Dokumentasi di Galeri Seni Topeng Malang

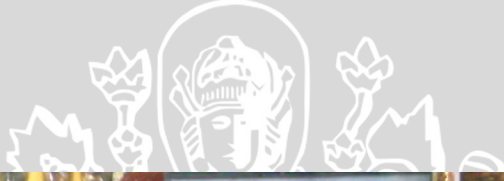


UNIVERSITAS BRAWIJAYA





UNI



JAYA





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Raya Singosari No. 275 Telp (0341) 456644 Fax (0341) 456622
Malang 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072149/1421.108/2011

Dengan ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang,
Menerangkan bahwa :

Nama : DYAH YUSI MARSATIANTI
Mhs. FIA Universitas Brawijaya
N I M : 0170310134
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Menerangkan bahwa mahasiswi tersebut telah selesai melaksanakan Research dengan Tema Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kebudayaan Daerah (*Studi pada Kebudayaan Topeng Malang*) dan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Jl. Raya Singosari 275 Singosari Malang, pada tanggal 15 Maret s.d 15 Juni 2011.

Demikian Surat Keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Juli 2011

An. KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MALANG

Sekretaris

Drs. SUKATON P.W. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19570323 198003 1 014

